

# Pertahanan Ibu Kota Negara Strategi dan Gelar Militer



# **Pertahanan Ibu Kota Negara**

## Strategi dan Gelar Militer

### **Penulis**

Curie Maharani, Iis Gindarsah, Utaryo Santiko dan  
Guntur Lebang

### **Asisten Penulis**

Amanda Shafira Callista, Patricia, Aurelia Anjani dan  
Andaru Zakaria

**Laboratorium Indonesia 2045  
2022**

## **Pertahanan Ibu Kota Negara: Strategi dan Gelar Militer**

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Center for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Universitas Bina Nusantara, 2022

### **Penulis**

Curie Maharani  
Iis Gindarsah  
Utaryo Santiko  
Guntur Lebang

### **Asisten Penulis**

Amanda Shafira Callista  
Patricia  
Aurelia Anjani  
Andaru Zakaria

### **Penyelaras Akhir**

Rinaldy

### **Desain Sampul dan Tata Letak**

Rinaldy  
Rudi Yusuf

Untuk mengutip:

Maharani, Curie, et. al. 2022. "Pertahanan Ibu Kota Negara: Strategi dan Gelar Militer". *LAB 45 Monograf*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 dan CBDS Universitas Bina Nusantara adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45 dan CBDS Universitas Bina Nusantara. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi monograf ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

### **Laboratorium Indonesia 2045**

Jalan Mabes Hankam No. T65  
Bambu Apus, Cilangkap  
Jakarta Timur  
+62811452045  
[lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id)

### **CBDS Universitas Bina Nusantara**

Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45,  
Palmerah  
Jakarta Barat  
+6221 534 5830 (Ext : 2631/2610)  
[ir.dept@binus.edu](mailto:ir.dept@binus.edu)

## **Kata Pengantar**

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan Center of Business and Diplomatic Studies (CBDS) Universitas Bina Nusantara telah menyelesaikan sebuah publikasi mengenai pertahanan ibu kota negara (IKN) dalam berbagai konflik bersenjata. Kolaborasi insititusal ini diinisiasi guna menyambut penetapan rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga 2045. Selain menjadi simbol bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, Ibu Kota Nusantara menandakan adanya *centre of gravity* baru di bidang pertahanan.

Secara umum, tim penulis membahas berbagai pertempuran yang melibatkan IKN sejak tahun 1910 hingga 2021. Beberapa faktor operasional seperti inisiator konflik, bentuk ancaman dan karakter medan laga diulas guna mengetahui efektivitas strategi pertahanan masing-masing IKN. Publikasi ini juga mencatat adanya kecenderungan penetapan IKN darurat oleh beberapa negara yang pernah terlibat dalam peperangan berlarut. Secara khusus, para penulis mengidentifikasi potensi kerawanan dan kemungkinan poros serangan musuh terhadap Ibu Kota Nusantara yang cenderung lebih besar dibanding Jakarta. Tak kalah penting, publikasi ini memberikan beberapa catatan bagi pengembangan strategi dan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia guna menangkal ancaman terhadap IKN baru.

Publikasi bersama antara LAB 45 dan CBDS Universitas Bina Nusantara ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran alternatif mulai dari proyeksi ancaman sampai strategi penangkalan bagi para pemangku kebijakan pertahanan negara. Dengan menginisiasi kegiatan semacam ini, kami hendak mendorong para akademisi dan praktisi untuk menghasilkan lebih banyak karya ilmiah tentang perencanaan pertahanan Ibu Kota Nusantara.

Jakarta, 15 Juni 2022

**Iis Gindarsah**

Koordinator LAB 45

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Singkatan dan Akronim .....	iv
Daftar Bagan.....	v
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Ringkasan Eksekutif.....	viii
Pendahuluan .....	1
Kajian Literatur .....	3
Data dan Metodologi .....	13
Pola Pertempuran di Ibu Kota Negara, 1910-2021 .....	18
Studi Kasus Pertempuran Ibu Kota Negara .....	32
Pola Pemindahan Ibu Kota Negara Darurat .....	43
Perencanaan Pertahanan Ibu Kota Nusantara .....	46
Saran Kebijakan Pertahanan Ibu Kota Nusantara.....	55

## Daftar Singkatan dan Akronim

AD	Angkatan Darat
AL	Angkatan Laut
ALKI	Alur Laut Kepulauan Indonesia
AS	Amerika Serikat
AU	Angkatan Udara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CoG	<i>Center of Gravity</i>
CoW	<i>Correlates of War</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	<i>Democratic Republic of Congo</i>
IKN	Ibu Kota Negara
KMT	Kuo Min Tang
Koarmada	Komando Armada
Kodamar	Komando Daerah Maritim
Koopsud	Komando Operasi Udara
Kosek	Komando Sektor
Lanal	Pangkalan Angkatan Laut
Lantamal	Pangkalan Utama Angkatan Laut
Lanud	Pangkalan Angkatan Udara
MDPL	Meter Di atas Permukaan Laut
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NTC	<i>National Transitional Council</i>
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	Peraturan Presiden
RAF	<i>Royal Air Force</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UAR	<i>United Arab Republic</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUDS	Undang-Undang Sementara
VIP	<i>Very Important People</i>

## Daftar Bagan

Bagan 1. Kelompok Literatur Terkait Pertahanan Ibu Kota Negara .....	4
Bagan 2. Tipologi Faktor Operasional Perang .....	16
Bagan 3. Lini Masa Pertempuran Ibu Kota Negara .....	18
Bagan 4. Pola Kawasan Pertempuran Ibu Kota Negara .....	19
Bagan 5. Pola Pertempuran Menurut Fungsi Ibu Kota Negara.....	20
Bagan 6. Pola Medan Pertempuran Ibu Kota Negara.....	21
Bagan 7. Pola Pertempuran Ibu Kota Negara Menurut Tipe Perang .....	22
Bagan 8. Inisiator Pertempuran di Ibu Kota Negara .....	22
Bagan 9. Bentuk Ancaman Terhadap Ibu Kota Negara.....	23
Bagan 10. Pola Serangan Terhadap Ibu Kota Negara .....	24
Bagan 11. Tujuan Serangan Terhadap Ibu Kota Negara.....	25
Bagan 12. Pola Strategi Pertahanan Ibu Kota Negara .....	26
Bagan 13. Karakter Geografi Pertempuran Ibu Kota Negara.....	27
Bagan 14. Pola Strategi Pertahanan Ibu Kota Negara Menurut Bentuk Ancaman dan Tujuan Serangan .....	28
Bagan 15. Pola Strategi Pertahanan Ibu Kota Negara Menurut Bentuk Serangan dan Medan Geografi.....	29
Bagan 16. Pola Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara.....	30
Bagan 17. Pola Hasil Akhir Perang Yang Melibatkan Ibu Kota Negara .....	31
Bagan 18. Pola Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara dan Hasil Akhir Perang.....	32
Bagan 19. Tipe Perang dan Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara .....	33
Bagan 20. Medan Geografi dan Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara ..	38
Bagan 21. Pola Ibu Kota Negara Darurat.....	44
Bagan 22. Peran Ibu Kota Negara Darurat dan Hasil Akhir Perang .....	45
Bagan 23. Karakter Medan Ibu Kota Negara Darurat dan Hasil Akhir Perang .....	45
Bagan 24. Pertimbangan Pemilihan Ibu Kota Negara Darurat dan Hasil Akhir Perang .....	46
Bagan 25. Skenario Pertahanan Ibu Kota Negara .....	51

## Daftar Gambar

Gambar 1. Ibu Kota Negara Dengan Serangan Terbanyak.....	20
Gambar 2. Peta Ibu Kota Nusantara.....	47
Gambar 3. Gelar Kekuatan Militer Amerika Serikat .....	49
Gambar 4. Gelar Kekuatan Militer Tiongkok .....	50
Gambar 5. Strategi Pertahanan Laut Nusantara .....	56
Gambar 6. Gelar Kemampuan Komando Armada Republik Indonesia.....	58
Gambar 7. Kendali Ruang Udara Nasional.....	59
Gambar 8. Gelar Kemampuan Komando Operasi Udara Nasional .....	60

## Daftar Tabel

Tabel 1. Faktor Geografi Militer .....	7
Tabel 2. Pola Pertempuran Ibu Kota Negara.....	17
Tabel 3. Pola Penyerangan Ibu Kota Negara Menurut Bentuk Ancaman dan Tujuan Serangan .....	26
Tabel 4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemindahan Ibu Kota Indonesia.....	54

## Ringkasan Eksekutif

Ibu kota negara dengan konsentrasi *centre of gravity* adalah target utama serangan musuh, baik dalam perang konvensional maupun hibrida. Namun, strategi pertahanan IKN belum banyak dikaji. Sejatinnya pertempuran IKN adalah peperangan kota yang menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi pihak penyerang maupun bagi pihak bertahan. Mengingat perubahan karakter ancaman dan perbedaan medan geografi, rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara meniscayakan strategi dan gelar pertahanan baru. Dalam konteks tersebut, studi ini menganalisis pola-pola terkait geografi militer, karakter ancaman, dan adopsi strategi dalam peperangan yang melibatkan IKN.

Secara umum, kajian ini terdiri atas tiga bagian. Pertama, analisis dua kelompok dataset, yaitu: (i) 152 pertempuran IKN di 67 negara selama periode 1914-2021 yang disusun menurut 11 kategori data; (ii) dataset penetapan IKN darurat di 17 negara. Dataset ini diseleksi dari 654 kasus yang dicatat dari *Correlates of War* yang kemudian dimutakhirkan. Yang kedua adalah proyeksi delapan skenario strategi pertahanan IKN dengan memperhatikan dua determinan, yakni geografi militer dan tipe perang. Terakhir, saran kebijakan mengenai strategi pertahanan Nusantara dengan memperhatikan perubahan karakter ancaman, celah peraturan perundang-undangan, sejarah, dan gelar militer.

Studi ini mencatat tiga temuan penting. Pertama, pola pertempuran IKN yang dominan dapat diidentifikasi berdasarkan momentum politik global (Perang Dunia), kawasan (Eropa), jenis perang (intranegara), inisiator perang, bentuk ancaman (agresi), pola serangan IKN (matra darat), tujuan serangan (perubahan rezim), strategi pertahanan IKN (fortifikasi), hingga medan geografi (kompleks dengan kedalaman strategis kecil). Kedua, pertahanan IKN yang didukung mobilitas strategis dan persiapan IKN darurat memiliki persentase keberhasilan yang cukup tinggi. Ketiga, skenario pertahanan IKN Nusantara yang disusun dengan mempertimbangkan medan geografi kompleks dan ancaman antarnegara -termasuk limpahan perang hegemonik, memunculkan kebutuhan perubahan paradigma dari pertahanan mendalam ke arah strategi antiakses/penangkalan.

## Pendahuluan

Sejarah peperangan modern mencatat bahwa Ibu Kota Negara (IKN) selalu menempati posisi vital, baik dalam keadaan damai maupun perang. Strategi pertahanan IKN memiliki beberapa kekhasan dibandingkan dengan wilayah lain di dalam suatu negara. Pertama, IKN merupakan pusat pemerintahan di mana para pejabat utama lembaga negara tinggal dan berkegiatan. Penaklukan ibu kota negara sebagai simbol kedaulatan nasional atau dekapitasi “orang-orang yang sangat penting” (*very important people*, VIP) merupakan salah satu upaya musuh untuk menghancurkan daya juang (*morale*) populasi guna memperoleh kemenangan (*victory*) dalam sebuah konflik antarnegara. Memang tidak semua perang menargetkan IKN ataupun dekapitasi VIP, seperti pada pengeboman nuklir Amerika Serikat terhadap Jepang yang tidak menysasar Tokyo pada tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam konteks tertentu, tidak melakukan dekapitasi VIP diperlukan agar para pemimpin politik dapat memberikan pernyataan kekalahan perang.<sup>2</sup> Pada kondisi lain, penangkapan VIP justru mempermudah kontrol atas populasi yang menjadi target perang.<sup>3</sup>

Strategi pertahanan IKN berangkat dari keniscayaan adanya perlindungan khusus bagi obyek-obyek yang dianggap menjadi bagian dari *Centre of Gravity* (CoG). Kajian ini mendefinisikan CoG sebagai pusat kekuatan yang apabila dilumpuhkan akan berakibat fatal bagi kemampuan suatu negara untuk memenangkan perang.<sup>4</sup> Mengutip doktrin *effect-based operation* Amerika Serikat, CoG meliputi 5 (lima) lapisan dari yang terluar ke yang terdalam: militer di medan tempur, populasi, infrastruktur, dan komponen-komponen esensial seperti pusat ekonomi, serta kepemimpinan politik.<sup>5</sup> Sebagian lapisan ini dapat berada di dalam suatu wilayah geografis,

---

<sup>1</sup> Contoh pengeboman udara yang serupa adalah pengeboman Baghdad oleh AS dan koalisinya pada Perang Teluk yang memaksa Irak untuk menarik pasukan dari Kuwait. Alan Taylor, “Operation Desert Storm: 25 Years Since the First Gulf War,” *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/photo/2016/01/operation-desert-storm-25-years-since-the-first-gulf-war/424191> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022).

<sup>2</sup> Contoh lain di era modern adalah agresi Rusia terhadap Ukraina yang urung melanjutkan serangan ke Kiev. Alih-alih mengambil alih ibu kota, Russia melakukan dekapitasi digital yakni menggunakan serangan siber untuk melemahkan citra kepemimpinan musuh. James Pearson dan Raphael Satter, “Internet in Ukraine disrupted as Russian troops advance,” *Reuters*, <https://www.reuters.com/world/europe/internet-ukraine-disrupted-russian-troops-advance-2022-02-26> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022).

<sup>3</sup> Contoh di era modern adalah AS menangkap Saddam Hussein untuk melemahkan kemampuan rezim Ba’ath yang selanjutnya juga mempengaruhi resistensi populasi Irak, “Former Saddam aide seeks to reshape Iraq’s Sunni insurgency,” *Reuters*, <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-douri-idUSKCN0X70L6> (diakses pada 31 Mei 2022).

<sup>4</sup> Antulio J. Echevarria II, *Clausewitz’s Center of Gravity: Changing our Warfighting Doctrine--Again!* (Charlisle, PA: Stategic Studies Institute, 2002), hlm. 12.

<sup>5</sup> David R. Mets, *The Air Campaign: John Warden and the Classical Airpower Theorists* (Maxwell AFB, AL: Air University Press, April 1999), hlm. 59-60.

terutama jika IKN juga merupakan pusat ekonomi. IKN yang memiliki lebih dari satu CoG cenderung lebih rawan terhadap kemungkinan serangan lawan.

Kedua, banyak ibu kota negara dibangun dengan struktur modern. Karakter pertempuran yang akan terjadi di sana akan berciri pertempuran kota (*urban warfare*), yang disebut oleh Clausewitz sebagai variasi medan tempur tersendiri.<sup>6</sup> Pertempuran kota cenderung dihindari oleh militer karena kompleksitas medannya.<sup>7</sup> Setidaknya ada lima karakteristik perang kota dimana para pihak yang bertikai menghadapi keterbatasan taktis, antara lain: (i) hanya bisa mengerahkan satuan kecil atau biasanya pasukan khusus; (ii) cenderung menggunakan sistem senjata jarak dekat; (iii) harus membatasi kekerasan/dampak pada warga sipil atau nonkombatan dan properti/infrastruktur; (iv) menghadapi bias pertahanan di mana keuntungan berada di pihak yang bertahan; dan (v) pihak penyerang membutuhkan personil yang sangat besar. Martin Van Creveld, misalnya, menghitung bahwa dibutuhkan superioritas 4-7 berbanding 1 untuk bisa menaklukkan sebuah kota benteng.<sup>8</sup> Bahkan, kemampuan teknologi yang dimiliki oleh negara maju diyakini akan tumpul dalam perang kota.<sup>9</sup> Pertempuran ibu kota cenderung tidak ideal bagi penganut strategi ofensif.

Terlepas dari kesulitan yang dihadapi pihak penyerang, penyusunan strategi pertahanan IKN tetap tidak mudah. Di era pra modern, perlindungan kota dikaji melalui konsep fortifikasi yang mengasumsikan dua faktor. Pertama, pertahanan di masa damai sama dengan di masa perang. Kedua, kota harus dipertahankan seluruhnya karena mengandung segitiga fungsi ekonomi, pemerintahan dan pertahanan.<sup>10</sup> Meskipun pemikiran ini tidak lagi dianggap relevan karena terlalu mahal,<sup>11</sup> belum ada pendekatan alternatif yang digagas oleh para pemikir strategis. Bidang ilmu perencanaan planologi perkotaan juga belum menyentuh aspek pertahanan.<sup>12</sup> Aspek pertahanan IKN cenderung baru muncul saat ancaman sudah di depan mata (*imminent*). Mayoritas IKN memang merupakan kota yang sudah lama berdiri. Akibatnya, perencanaan

---

<sup>6</sup> G. J. Ashworth, *War and the City* (London: Routledge, 1991), hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>8</sup> Martin van Creveld, *Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hlm. 41.

<sup>9</sup> Hasil pengamatan di Perang Chechnya menunjukkan penggelaran kendaraan lapis baja tanpa adanya usaha penggelaran terpadu oleh Rusia akan menimbulkan banyak korban di perkotaan. Lihat lebih lanjut di Marine Corps Intelligence Activity, *Urban Warfare Study: City Case Studies Compilation* (Quantico, VA: 1999).

<sup>10</sup> G. J. Ashworth, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> The American Institute of Planners, "Defense Considerations in City Planning," *Bulletin of Atomic Scientist* 9, No. 7 (1953), hlm. 268.

pertahanannya harus menyesuaikan tata kota yang ada. Berbeda dengan IKN baru, di mana aspek pertahanan relatif dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata kota.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara hingga tahun 2045. Pemindahan ini berimplikasi pada perubahan geografi militer dan karakter ancaman yang meniscayakan adanya penyesuaian strategi pertahanan nasional. Berbeda dari Jakarta yang terletak di Pulau Jawa, Nusantara tidak berlokasi di pinggir pantai dan terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan di darat dengan Malaysia. Pemindahan IKN juga menantang relevansi pembangunan pertahanan yang selama ini berpusat kepada Jawa dan wilayah selatan Indonesia.<sup>13</sup> Namun, Nusantara yang akan dibangun dari nol, memungkinkan integrasi perencanaan pertahanan dengan tata kota dilakukan secara optimal.

Berangkat dari konteks tersebut, laporan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis pola-pola terkait geografi militer, karakter ancaman dan adopsi strategi dalam peperangan yang melibatkan IKN dari tahun 1910-2021. Kedua, mengkaji skenario pertempuran dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pertahanan IKN. Ketiga, menyusun saran kebijakan bagi perencanaan strategi pertahanan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

## **Kajian Literatur**

Tidak banyak ditemukan publikasi mengenai aspek pertahanan ibu kota negara.<sup>14</sup> Bagian sebelumnya sudah menyebutkan beberapa konsep terkait

---

<sup>13</sup> Misalnya, gelar radar di Kalimantan dan Sulawesi masih belum cukup untuk memungkinkan pengendalian wilayah udara secara absolut. Presentasi dari Mayjen TNI Dr. Jonni Mahroza, S.IP., M.A., M.Sc. dengan judul "Tantangan Fortifikasi IKN dan Mobilitas Strategis" pada FGD bertajuk "Pertahanan Ibu Kota Negara" yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti Universitas Bina Nusantara dan LAB 45 pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>14</sup> Hanya ada tiga literatur yang dapat diakses, yakni Buku *War and the City* (1991) yang ditulis oleh Ashworth, *Capital Cities at War: Paris, London, Berlin 1914-1919* (1997) oleh Winter dan Robert, *Capital Cities in Civil Wars: the Locational Dimension of Sovereign Authority* (2008) yang ditulis oleh Landau-Wells. Buku pertama merupakan acuan literatur terlengkap: membahas hubungan antara pertahanan dengan ruang spasial kota, dengan memasukkan konsep geografi, fortifikasi, insurgensi, pertahanan udara hingga sistem pertahanan. Buku kedua secara umum mengkaji komparasi sejarah urban tiga IKN di Eropa yang menjadi sasaran serangan selama Perang Dunia I, kan tetapi tidak membahas secara khusus aspek pertahanan melainkan lebih kepada dampak serangan terhadap masyarakat sipil dan adaptasinya. Sedangkan literatur terakhir merupakan esai berdurasi 26 halaman yang membahas bagaimana aktor internasional menentukan siapa pemegang kedaulatan negara dalam konteks perang sipil dan identifikasi faktor krusial yang memenangkan dukungan komunitas internasional. Adapun literatur IKN yang bergulir di Indonesia mengangkat

kekhasan pertahanan ibu kota, seperti kerentanan ibu kota terkait posisinya yang mengandung lebih dari satu CoG,<sup>15</sup> karakter pertempuran kota yang cenderung membatasi pihak penyerang,<sup>16</sup> dan fortifikasi yang membebani pihak bertahan.<sup>17</sup> Studi ini mencatat tiga kelompok literatur terkait pertahanan IKN. Pertama, literatur mengenai kerentanan IKN yang dihubungkan dengan kemenangan perang (*victory*) dan CoG. Kedua, literatur pertempuran IKN yang dipengaruhi oleh geografi militer dan peperangan kota. Ketiga, gelar kekuatan pertahanan IKN yang mencakup pangkalan aju dan pertahanan dalam.

**Bagan 1. Kelompok Literatur Terkait Pertahanan Ibu Kota Negara**



Kelompok literatur pertama berpendapat bahwa kerentanan IKN tidak akan terlepas dari definisi tentang kemenangan perang, meskipun sejarah membuktikan bahwa ibu kota negara tidak selalu menjadi target serangan utama atau syarat kemenangan dalam konflik. Kemenangan perang memiliki banyak interpretasi dari tataran taktis hingga strategis.<sup>18</sup> Kemenangan taktis yang berdampak strategis kerap disebut sebagai

konsep geografi militer, seperti artikel jurnal yang berjudul *Pertimbangan Pemindahan Ibu kota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan* (2013) yang ditulis oleh Supriyatno dan prosiding berjudul *The Safe Indonesian Capital from the Defence Perspective (Study Case: Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Regency, East Borneo Province)* (2020) yang ditulis oleh Kapiarsa, Kurniawan, Ali serta Supriyatno.

<sup>15</sup> David R. Mets, *The Air Campaign: John Warden and the Classical Airpower Theorists* (Maxwell AFB, AL: Air University Press, April 1999), hlm. 59-60.

<sup>16</sup> G. J. Ashworth, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Willie Curtis Martel, *Victory in War: Foundations of Modern Military Policy*, (New York: Cambridge University Press Martel, 2007), hlm. 97.

“pertempuran menentukan” (*decisive battle*) di mana satu pihak berhasil membuat pihak lain kehilangan daya juang untuk meneruskan pertempuran. Kemenangan pada tingkat operasional ditandai oleh dua aspek, yakni aspek fisik berupa kekalahan militer lawan dan aspek psikologis yang berwujud sebagai perubahan sikap atau kebijakan politik negaranya. Dalam pembahasan strategi raya (*grand strategy*), kemenangan ditandai dengan perubahan mendasar pada sistem internasional setelah penghancuran ideologi dan moral masyarakat yang diikuti dengan pembangunan kembali fondasi negara lawan, baik pemerintah, ekonomi maupun militernya.

Operasionalisasi kemenangan perang berbeda di mata aktor, baik negara maupun nonnegara, tergantung dari kapabilitas dan risiko yang dapat ditanggung. Di era Perang Dingin, keberadaan teknologi seperti senjata nuklir turut memengaruhi kemenangan yang bisa dicapai di mana perubahan *status quo* justru ditakutkan akan menimbulkan ongkos yang terlalu besar berupa perang nuklir. Pada Perang Korea, kemenangan AS dan sekutu hanya sampai pada tataran operasional, yakni mendorong mundur Korea Utara dan Tiongkok ke belakang garis demarkasi namun tidak sampai mengganti rezim dan menaklukkan wilayah musuh.

Kriteria kemenangan perang suatu negara juga dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan kekuatan nasional. Misalnya, kriteria kemenangan perang AS sangat komprehensif hingga mencakup: (1) mengalahkan kekuatan militer musuh dan infrastruktur ekonominya, (2) kendali atas negara musuh, (3) reformasi politik dan pemerintahan, (4) pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur, (5) menyetel kembali kebijakan luar negeri musuh, hingga (6) membangun hubungan strategis baru dengan negara yang kalah.<sup>19</sup> Beberapa kriteria kemenangan perang dapat tercapai sekaligus melalui serangan terhadap IKN. Misalnya, kriteria pertama akan berlaku apabila IKN menjadi pusat kekuatan militer dan infrastruktur ekonomi nasional. Kriteria kedua dan ketiga menjadi relevan karena IKN merupakan pusat politik dan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kemenangan perang juga diukur berdasarkan penggunaan sumber daya secara efektif.<sup>20</sup> Di sini, konsep CoG berperan penting dalam menentukan prioritas sasaran serangan.<sup>21</sup> Meski dicetuskan oleh Clausewitz, interpretasi CoG secara garis besar terbagi ke dalam dua garis pemikiran. Garis pertama

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>20</sup> Milan Vego, “Centre of Gravity,” *Military Review* 80, no. 2 (2000), hlm. 23-29.

<sup>21</sup> *Ibid*.

adalah yang mengikuti definisi Clausewitz, bahwa CoG adalah “titik sentral” (*focal point*), sedangkan garis kedua lebih dekat dengan konsep Jomini mengenai “titik yang menentukan” (*decisive points*).<sup>22</sup>

Vego menyatakan bahwa kearifan dalam memahami CoG harus dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kritis yang mengacu pada kekuatan (*critical strength*) atau kelemahan (*critical weaknesses*) dari kekuatan militer atau sumber-sumber power yang bersifat nonmiliter. Ia juga menjelaskan bahwa faktor kritis hadir pada tataran yang berbeda dan dapat bersifat abstrak maupun konkret.<sup>23</sup> Secara strategis dan operasional, faktor kritis nyata dapat mencakup disposisi geografis hingga kekuatan militer. Sedangkan faktor kritis abstrak mencakup kemauan berperang, kesatuan koalisi, dukungan publik hingga daya juang dan disiplin. Meskipun contoh CoG didominasi oleh kekuatan militer, namun tidak tertutup juga operasionalisasi CoG yang berasal dari sumber nonmiliter. Pada kasus AS melawan Al Qaeda misalnya, Osama Bin Laden ditetapkan sebagai salah satu kelemahan lawan yang harus dinetralisir meskipun tidak otomatis akan mengakhiri perang.<sup>24</sup>

Vego mempostulasikan bahwa CoG dan tujuan perang adalah bagian paling penting dalam setiap perencanaan militer.<sup>25</sup> Pertama, hubungan CoG dan tujuan perang sangat dekat dan saling memengaruhi. CoG memberikan fondasi untuk seleksi tujuan taktis dan CoG terkait. Contohnya adalah upaya AS menghancurkan atau netralisasi Garda Republik Irak pada tataran operasional, yang berdampak melemahkan elemen nyata dan abstrak dari COG strategis Irak. Kedua, jumlah CoG terkait langsung dengan jumlah tujuan militer yang hendak dicapai. Semakin tinggi tataran perang, semakin sedikit CoG yang disasar karena ada konsekuensi drastis dari salah identifikasi CoG lawan maupun kawan. Semakin CoG terkonsentrasi secara fisik semakin mudah ia diidentifikasi, meskipun CoG juga bisa berubah atau pun bergeser. Ketiga, terlepas dari jumlah CoG operasional, semuanya harus diserang atau dinetralisir oleh akumulasi operasi bersama/gabungan yang menjadi bagian dari operasi besar. Biasanya sebelum melancarkan serangan darat, sejumlah tujuan operasional harus dituntaskan terlebih dahulu melalui kekuatan udara atau laut.

---

<sup>22</sup> Antulio J. Echevarria II, *Reigning in the Center of Gravity Concept* (Alabama: Air & Space Power Journal Summer, 2003).

<sup>23</sup> Milan Vego, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>24</sup> CoG lain yang dianggap bisa menghentikan perang adalah menetralisir sentimen kebencian terhadap barat di kalangan populasi muslim. Lihat Echevarria II, A. J. (2002), hlm. 7-8.

<sup>25</sup> Milan Vego, *Loc. Cit.*

Kelompok literatur kedua mengangkat faktor kondisi lingkungan dan tipe pertempuran perkotaan. Faktor geografis dibagi menjadi faktor fisik dan faktor sosial-budaya, yang memengaruhi keseluruhan aktivitas kemiliteran seperti strategi, taktik dan doktrin; struktur organisasi; komando dan kendali; optimalisasi kekuatan matra gabungan di darat, udara, dan laut; penetapan target; pengumpulan informasi intelijen; dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Relasi spasial terkait dengan lokasi, luas, dan bentuk wilayah yang mempengaruhi keunggulan, keterbatasan, dan kerawanan sebuah operasi militer. Lokasi terdiri dari antara lain akses ke laut, lokasi geografis yang aman yang memisahkan sebuah negara dari wilayah musuh atau wilayah berbahaya, posisi geografis dominan yang memberi keuntungan.<sup>27</sup> Luas dan bentuk wilayah dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah operasi militer, baik dari sisi pihak penyerang maupun pihak yang bertahan. Hal tersebut terkait dengan antara lain pemanfaatan luas wilayah untuk melakukan manuver dan keleluasaan dalam pemilihan strategi.

**Tabel 1. Faktor Geografi Militer**

No.	Faktor Fisik	Faktor Sosial-Budaya
1	Relasi Spasial	Akar Ras dan Etnis
2	Topografi dan Drainase	Pola Populasi
3	Geologi dan Tanah	Struktur Sosial
4	Vegetasi	Bahasan dan Religi
5	Laut dan Pantai	Industri dan Pemanfaatan Lahan
6	Cuaca dan Iklim	Jejaring Transportasi
7	Siang Hari dan Malam Hari	Telekomunikasi
8	Gravitasi dan Magnetisme	Instalasi Militer

Sumber: John. Collins, *Military Geography: For Professionals and the Public* (Washington D.C.: National Defense University Press, 1998), hlm. 4.

Faktor fisik lain adalah bentang wilayah darat yang mempengaruhi kemampuan kekuatan darat dan udara dalam melakukan manuver, mengidentifikasi target, berkoordinasi, serta melaksanakan serangan. Wilayah darat dengan kontur fisik yang tinggi seperti pegunungan,

<sup>26</sup> John M. Collins, *Military Geography: For Professionals and the Public*, (Washington D.C.: National Defense University Press, 1998), hlm. 3.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 11-16.

perbukitan, lereng yang curam akan membatasi keleluasaan pelaksanaan operasi militer. Sebaliknya, wilayah darat yang didominasi dataran lebih sering menjadi wilayah pelaksanaan operasi militer.<sup>28</sup> Sungai juga menjadi faktor yang diperhitungkan, baik dalam konteks wilayah yang menjadi akses dilakukannya serangan, sebagai mekanisme fortifikasi, atau sebagai cadangan air yang dibutuhkan selama pelaksanaan operasi militer.

Karakteristik perairan pesisir dan laut mempengaruhi pemilihan strategi dan taktik operasi militer serta seluruh aktivitas militer pada matra laut, termasuk desain kapal perang dan teknologi yang dibutuhkan. Selat dan *choke points* yang dekat dengan jalur komunikasi laut (*sea line of communication*) juga kerap menjadi target penyerangan dan menjadi objek penting yang harus dilindungi. Pantai dan laut juga dapat menjadi akses dilakukannya serangan amfibi di mana terdapat aset strategis seperti pelabuhan yang dapat menjadi titik awal dilaksanakannya operasi militer ke wilayah-wilayah dalam negara yang lebih strategis.<sup>29</sup>

Faktor lingkungan lain yang memengaruhi pertahanan IKN adalah kedalaman strategis (*strategic depth*). Sebagai konsep militer, kedalaman strategis merujuk pada jarak yang cukup jauh antara pasukan atau wilayah perbatasan ke CoG sebuah negara<sup>30</sup>. Hipotesisnya, jarak yang jauh memberikan lebih banyak ruang serta waktu bagi pihak bertahan untuk menggelar pertahanannya serta memaksa pihak lawan untuk mempertebal rantai logistiknya.

Defisit kedalaman strategis akan mendorong negara untuk melakukan inovasi pertahanan atau mengambil kebijakan pertahanan tertentu untuk menghadapi masalah tersebut. Contoh dua negara yang mengalami kondisi ini adalah Israel dan Singapura. Kondisi perbatasan darat yang panjang serta kecenderungan permusuhan negara tetangga membuat Israel mengembangkan paradigma pertahanan yang cenderung ofensif dan cepat.<sup>31</sup> Kondisi geopolitik tersebut juga mendorong penguasaan teknologi yang mumpuni dari militer Israel.<sup>32</sup> Sementara Singapura mengembangkan doktrin "pertahanan semesta (*total defence*) untuk memastikan setiap komponen bangsa mendukung upaya bertahan dari

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>30</sup> Robert Mason, "Strategic Depth Through Enclaves: Iran, Syria, and Hezbollah," *Middle East Policy* 28, no. 2 (2021), hlm. 97.

<sup>31</sup> David Rodman, "War initiation: the case of Israel," *The Journal of Strategic Studies* 20, no. 4 (1997), hlm. 6.

<sup>32</sup> Richard A. Bitzinger, "Military-technological innovation in small states: the cases of Israel and Singapore," *Journal of Strategic Studies* 44, no. 6 (2021), hlm. 876, 880-881.

ancaman musuh<sup>33</sup> dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri guna memastikan ketersediaan, pemeliharaan serta modifikasi sistem persenjataan yang diimpor.<sup>34</sup>

Pada tataran praktis, medan pertempuran IKN akan bercirikan peperangan kota (*urban warfare*) mengingat proses urbanisasi dan perluasan wilayah perkotaan di Abad XXI. Literatur tentang topik ini dapat dipetakan ke dalam elemen tiga elemen utama, yaitu wilayah kota, jenis persenjataan, serta pasukan yang terlibat. Ketiga elemen tersebut – luas dan kontur geografi dari wilayah perkotaan di mana pertempuran terjadi; persenjataan yang tersedia dalam pertempuran; serta jumlah dan jenis pasukan yang diterjunkan – membentuk sesuatu yang kemudian disebut sebagai *battlescape*.<sup>35</sup> Secara khusus, King memberi perhatian khusus pada jumlah pasukan. Jumlah pasukan yang lebih kecil dibandingkan peperangan di Abad XX, mendorong semakin banyaknya peperangan kota karena jumlah pasukan yang tersedia tidak mencukupi untuk membentuk sebuah *front*. Selain itu, jumlah pasukan yang lebih sedikit mengubah pertempuran kota dari pertempuran di seluruh bagian kota menjadi penyerangan-penyerangan berskala kecil.<sup>36</sup>

Peran penting bangunan dalam peperangan kota juga dikemukakan oleh Spencer. Perkotaan dianggap tidak netral dalam peperangan dan cenderung akan menguntungkan pihak yang bertahan.<sup>37</sup> Bangunan-bangunan yang terdapat di kota akan lebih ideal untuk melakukan pertahanan dengan memanfaatkan keberadaan tembok-tembok untuk menghadapi persenjataan pihak penyerang.<sup>38</sup> Dengan menguasai gedung tinggi, pasukan yang mempertahankan kota bisa mendeteksi penyerang yang memiliki keterbatasan untuk melindungi pergerakannya. Pasukan pertahanan kota juga cenderung lebih memahami lingkungan perkotaan, sehingga bisa lebih efektif dalam menggunakan setiap dimensi di dalam kota.

Di luar dimensi taktik militer, peperangan kota juga sangat dipengaruhi oleh keilmuan lain seperti sosiologi dan antropologi. Kaldor dan Sassen meyakini bahwa memahami kekhasan kota menjadi esensial dalam

---

<sup>33</sup> Richard A. Deck, 'Singapore: Comprehensive Security – Total Defense', in Ken Booth and Russell Trood

(eds.), *Strategic Cultures in the Asia-Pacific Region* (London: Palgrave Macmillan 1999), hlm. 247–269.

<sup>34</sup> Bitzinger, *Op.Cit.*, hlm. 887.

<sup>35</sup> Anthony King, *Urban Warfare in the Twenty-First Century*, (Wiley, 2021), hlm. 228.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> John Spencer, "The City Is Not Neutral: Why Urban Warfare Is So Hard," *Modern War Institute*, <https://mwi.usma.edu/city-not-neutral-urban-warfare-hard/> (diakses pada tanggal 31 Mei 2022).

<sup>38</sup> John Spencer, *The Mini Manual for the Urban Defender*, (2022), hlm. 4.

peperangan kota, terutama dengan meningkatnya kombinasi asimetris antara pasukan militer tradisional dan grup-grup non-konvensional lainnya dalam perang perkotaan.<sup>39</sup> Keduanya menekankan bahwa penduduk kota menjadi faktor penting dalam peperangan kota, dimana usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk mempengaruhi interaksi antara penyerang dengan pihak yang bertahan.<sup>40</sup>

Tren perkembangan kota juga tidak bisa dilepaskan dari peperangan, terutama jika berkaitan dengan aktor non-negara di wilayah perkotaan. Kilcullen menyoroti empat tren utama untuk kota-kota besar, yaitu pertumbuhan penduduk, urbanisasi, klasterisasi perkotaan di wilayah pesisir hingga meningkatnya konektivitas digital<sup>41</sup>. Faktor-faktor tersebut, terutama peningkatan keterhubungan dan jaringan, mengakibatkan paradigma konflik seperti kontrainsurgensi dan kontraterorisme tidak cukup untuk menjelaskan peperangan kota. Kilcullen kemudian menyoroti pentingnya bagi penyerang untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi para penduduk agar bisa bekerja sama dalam menghadapi ancaman.<sup>42</sup>

Kelompok literatur terakhir membahas pola pertahanan dalam pertempuran ibu kota melalui fortifikasi dan mobilitas strategis. Fortifikasi meliputi struktur fisik yang sengaja didirikan untuk memberikan keuntungan militer kepada pihak yang bertahan dan sekaligus menghambat atau merugikan pihak penyerang.<sup>43</sup> Pembahasan fortifikasi dalam pertahanan kota terbagi atas fungsi dan manifestasinya. Menurut Weber dan Mumford, kota memiliki tiga fungsi yakni perdagangan, pemerintahan, dan pertahanan yang saling membutuhkan dan saling mendukung sehingga fortifikasi menjadi bagian intrinsik dari sebuah kota.<sup>44</sup> Namun, perbedaan fungsi kota membuat fortifikasi tidak otomatis dibangun setara. Variasi tipe ancaman, seperti pemberontakan, agresi, atau pertahanan kota sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional/regional, juga membedakan fortifikasi.

Ashworth mengkaji kelebihan dan kekurangan fortifikasi bagi pihak penyerang maupun yang bertahan. Dalam perhitungan militer, fortifikasi

---

<sup>39</sup> Mary Kaldor dan Saskia Sassen, ed., *Cities at War: Global Insecurity and Urban Resistance* (New York: Columbia University Press, 2020), hlm. 2.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 231.

<sup>41</sup> David Kilcullen, *Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerilla* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 17.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>43</sup> G. J. Ashworth, *War and the City* (London: Routledge, 1991), hlm. 12.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

meningkatkan rasio kesulitan upaya serangan terhadap pertahanan yang membuatnya lebih mahal atau bahkan tidak layak dari segi risiko. Sebaliknya, bagi pihak yang bertahan, fortifikasi menelan ongkos tinggi untuk konstruksi dan pemeliharaan. Fortifikasi pun merugikan ekonomi karena membatasi pergerakan, pemanfaatan lahan, dan ekspansi kota. Sehingga, fortifikasi justru dianggap merugikan ketimbang menguntungkan.

Memasuki abad ke-15, fortifikasi dalam bentuk benteng kota tidak lagi menjadi pilihan utama. Determinan perubahan ini mencakup<sup>45</sup>: (i) ekspansi militer; (ii) inovasi teknologi seperti penemuan kanon, kemajuan artileri jarak jauh, dan *air power*; (iii) perluasan kota akibat industrialisasi. Sejarah kemudian mencatat bahwa fortifikasi tidak ditinggalkan, namun berevolusi. Fortifikasi berubah dalam bentuk, lingkup, dan teknologi. Misalnya, inovasi kanon menyebabkan bentuk fortifikasi berubah dari segi empat menjadi pentagon yang disebut sebagai "*trace italliene*". Pada abad ke-19, fortifikasi berevolusi dalam hal lingkup dan teknologi. Misalnya, perluasan kota Paris dan wajib militer pada dekade 1850an mengubah fortifikasi menjadi lingkaran benteng di luar kota yang dilengkapi artileri dan garrison besar, dengan tujuan untuk menjauhkan pertempuran dari kota. Pada abad ke-20, kota yang terlalu besar dan inovasi *air power* menjadikan lingkaran pertahanan luar kota kurang efektif. Garis pertahanan kemudian dijauhkan lagi dari kota dan mendekati perbatasan, sehingga fortifikasi ibu kota menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional yang integral.

Pada spektrum yang berlawanan dengan fortifikasi adalah mobilitas strategis. Konsep ini memiliki definisi dan operasionalisasi taktis yang beragam dalam kebijakan, doktrin, dan strategi pertahanan di banyak negara.<sup>46</sup> Secara garis besar, mobilitas strategis memiliki beberapa unsur yakni: (i) mobilisasi pasukan; (ii) distribusi logistik; dan (iii) infrastruktur transportasi aset-aset militer. Mobilisasi personel militer dilakukan untuk memastikan pemenuhan kepentingan negara, baik dalam upaya pertahanan maupun proyeksi kekuatan.<sup>47</sup> Definisi tersebut menggambarkan kebutuhan perencanaan, peramalan, dan sinkronisasi

---

<sup>45</sup> Anthony King, *Urban Warfare in the Twenty First Century*, (Cambridge: Polity Press, 2021), hlm 204-233.

<sup>46</sup> Lihat U.S. Department of Defense, *Joint Publication 3-35, Joint Deployment and Redeployment Operations*, (Joint Chiefs of Staff Publication, 10 Januari 2018), hlm. 1-7, [https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3\\_35.pdf](https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_35.pdf); Senior NATO Logisticians' Conference Secretariat, *NATO Logistic Handbook* (1997), <https://www.nato.int/docu/logi-en/1997/defini.htm>.

<sup>47</sup> Martin van Creveld, *Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hlm. 1.

antar elemen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi militer termasuk ketersediaan alat dan infrastruktur transportasi.

Secara operasional, gelar pertahanan IKN merupakan bagian dari postur pertahanan negara. Strategi “pertahanan mendalam” (*indepth defence*) menempatkan pihak yang bertahan untuk mengeksploitasi kelemahan musuh setelah pihak musuh berhasil untuk menguasai sebagian wilayah dan dengan demikian mengekspos dirinya.<sup>48</sup> Efektivitas strategi ini berdasar pada fakta bahwa pihak yang melakukan serangan untuk menguasai wilayah lawan akan mengekspos kelemahan-kelemahannya dan membuka kesempatan dilakukannya serangan balik oleh pihak yang bertahan.

Model gelar kedua adalah “pangkalan aju” (*forward presence*) yang bertumpu pada keniscayaan kecepatan mobilisasi, yakni efisiensi waktu pengerahan hingga operasionalisasi pasukan, sumber daya, logistik, dan sebagainya, terhadap kondisi menghadapi suatu ancaman.<sup>49</sup> Pangkalan aju banyak disebut dalam literatur terkait AS bukan dalam konteks pertahanan, melainkan proyeksi kekuatan untuk kepentingan ofensif hingga hegemonik. Literatur yang ada memetakan pangkalan aju ke dalam perannya dalam stabilitas internasional,<sup>50</sup> bentuk gelar,<sup>51</sup> dan efektivitasnya.

Pangkalan aju memiliki keuntungan strategis terbatas, yakni pada kondisi misi yang peka waktu dan sebagai respons sementara untuk mencegah kekalahan. Semakin besar tingkat ancaman suatu daerah, maka semakin kokoh pula pangkalan aju yang dibutuhkan. Secara kecepatan mobilisasi, matra udara tetap paling efisien disusul dengan matra laut dan diakhiri oleh unit ekspedisi marinir serta pasukan amfibi. Dibutuhkan infrastruktur dan rute mobilisasi yang kokoh dan antisipatif beserta armada angkut laut dan udara sebagai dukungan terhadap pangkalan aju. Tanpa keduanya, pertahanan akan terbatas di lokasi tertentu dengan fleksibilitas yang rendah. Efisiensi maksimum akan tercapai apabila pangkalan aju berhasil dibentuk di area yang rentan terhadap penyerangan dengan jarak dekat dari destinasi.

---

<sup>48</sup> Elbridge A. Colby, *The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict*, (New Haven, CT: Yale University Press, 2021), hlm. 174 – 176.

<sup>49</sup> Michael J. Lostumbo, et al., *Overseas Basing of U.S. Military Forces: An Assessment of Relative Costs and Strategic Benefits* (California: RAND Corporation, 2013).

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Joshua Rovner dan Caitlin Talmadge, “Hegemony, Force Posture, and the Provision of Public Goods: The Once and Future Role of Outside Powers in Securing Persian Gulf Oil,” *Security Studies* 23 (2014), hlm. 548.

Operasionalisasi gelar pertahanan IKN juga dapat dikaitkan dengan konsep kedalaman strategis. Misalnya, negara yang memiliki keuntungan kedalaman strategis terutama Rusia dan Tiongkok dapat mengandalkan strategi pertahanan mendalam.<sup>52</sup> Pendekatan strategis tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pihak yang bertahan untuk menghindari kekalahan dan menemukan momentum untuk meraih kemenangan dalam perang. Hal ini dilakukan dengan: (a) mencegah pihak musuh (penyerang) merebut wilayah kunci, dan (b) mencegah pihak musuh (penyerang) menguasai wilayah yang direbutnya. Sebaliknya, negara-negara seperti Singapura dengan defisit kedalaman strategis justru mengembangkan doktrin militer yang bertumpu pada pertahanan depan (*forward defence*), mobilitas strategis, serangan pendahuluan (*pre-emptive strike*) untuk mencegah pertempuran menyentuh ruang strategis seperti ibu kota negara.<sup>53</sup>

Sesungguhnya, strategi pertahanan mendalam dan pangkalan aju tidak perlu menjadi dikotomi. Operasionalisasi kombinasi dari kedua gelar ini ditemukan pada Tiongkok, yang mengaplikasikan strategi pertahanan mendalam sejak tahun 1990an,<sup>54</sup> tetapi kemudian bergerak kepada pangkalan aju pada dekade 2010an melalui pembangunan “angkatan laut biru” (*blue water navy*) dan basis militer di luar negeri seperti di Laut China Selatan hingga pantai timur Afrika.

## Data dan Metodologi

Data yang digunakan dalam kajian ini mengacu kepada riset dari *Correlates of War* (CoW), yang menggunakan pendekatan kualitatif historis untuk memahami perang secara sistematis. Hasil riset tersebut telah diterbitkan sebagai buku yang berjudul *Resort to War: A data guide to*

---

<sup>52</sup> Diskursus tentang aplikasi *Defense in Depth* dalam Strategi Pertahanan Rusia serta operasionalisasi strategisnya dapat dilihat dalam Michael Kofman, Anya Fink, Dmitry Gorenburg, et. al., *Russian Military Strategy: Core Tenets and Operational Concepts*, Center for Naval Analyses (CNA) Research Memorandum DRM-2021-U-029755-Final, August 2021

<sup>53</sup> Bitzinger, *Op. Cit.*, hlm. 880-881.

<sup>54</sup> Dengan kapabilitas penangkalan di wilayah darat (*continental denial*), Tiongkok mengkombinasikan kedalaman strategis di wilayah perbatasan yang luas dengan jumlah populasi yang sedikit, yang memungkinkan Tiongkok untuk mengamankan penduduk dan pusat ekonominya dari serangan darat pihak musuh. Kondisi tersebut memungkinkan Tiongkok untuk mengembangkan dan memperkuat kapabilitas *area denial* di wilayah pinggir (*periphery*) dengan membangun *buffer* di wilayah darat dan laut yang akan meningkatkan resiko bagi pihak musuh yang melakukan serangan. Kapabilitas *maritime denial* dikembangkan Tiongkok sejak 2006 dengan strategi *strategic depth for coastal defense* yang diimplementasikan dengan kebijakan memodernisasi kekuatan tempur lautnya secara bertahap. Lihat M. Taylor Fravel, “China’s Search for Military Power,” *The Washington Quarterly* 31, no. 3 (2008), hlm. 131-132.

*inter-state, extra state, intra-state, and non-state wars, 1816-2007*. Ada tiga data perang yang diunduh dari studi tersebut, yakni konflik antarnegara (*interstate*), intranegara (*intra-state*), dan konflik lainnya (*extra state*). Dataset tersebut disusun dengan kategorisasi utama sebagai berikut: nomor kode perang, nama perang, tipe perang, nama dan nomor kode partisipan (A dan B), internasionalisasi perang, tanggal mulai dan berakhir perang, transformasi perang, pihak yang menginisiasi perang, kawasan perang, jumlah korban, serta hasil akhir perang.

Meskipun dataset CoW merupakan salah satu sumber terlengkap, masih terdapat kekurangan yang menjadikannya sulit digunakan secara langsung pada kajian ini. Misalnya, ada perbedaan cara penyusunan kategori aktor di mana data konflik intranegara mencatat kedua pihak berseteru, sedangkan data perang antarnegara hanya mencatat satu pihak saja. Selain itu, terdapat perbedaan unit analisis antara dataset CoW yang mengkaji perang secara umum dengan studi ini yang hendak menganalisis pertempuran IKN.

Guna menyiasati permasalahan tersebut, studi ini melakukan beberapa modifikasi dataset CoW. Penyesuaian kategorisasi data dilakukan untuk mengintegrasikan tipe perang antarnegara dan konflik intranegara ke dalam satu dataset baru. Unit analisis juga berubah dari semula kampanye militer (*war*) ke tingkat operasional-taktis atau pertempuran (*battle*). Selain itu, karena periodisasi dataset CoW berakhir di tahun 2007, pemutakhiran data dilakukan dengan menambahkan Perang Libya dan Perang Suriah (2011), serta satu kasus yang melibatkan Indonesia di masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1949 yang tidak terekam dalam dataset CoW.

Berdasarkan penelusuran kajian literatur, studi ini tidak menemukan konsep pertahanan khusus IKN. Hanya terdapat beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan pertahanan IKN seperti geografi militer, peperangan kota, CoG, kemenangan perang, dan fortifikasi. Operasionalisasi konsep-konsep tersebut menjadi dasar kategorisasi penambahan data pertempuran IKN.

Geografi militer mempostulasikan bahwa aktivitas militer cenderung dipengaruhi oleh medan (*terrain*) dan lingkungan. Secara operasional, geografi militer dapat bersifat homogen atau serupa dan rumit atau kompleks, yang diukur berdasarkan medan geografi dan kedalaman strategis. Medan geografi dapat berupa dataran, perbukitan, persungai, dan pegunungan; gabungan lebih dari dua medan geografi akan menghasilkan kategori medan yang kompleks. Kedalaman strategis

mengacu pada rentang logistik perang dari sisi penyerang, yang diukur berdasarkan jarak antara IKN yang menjadi target ke perbatasan darat dan pelabuhan laut terdekat.<sup>55</sup> Kajian ini berasumsi bahwa IKN dengan geografi militer rumit akan mempersulit pihak penyerang (*offender*); begitu pula IKN dengan kedalaman strategis yang jauh dari perbatasan/pelabuhan. Analisis data diarahkan untuk menemukan tren geografi militer dan kedalaman strategis dan dampaknya pada efektivitas pertahanan IKN.

Adapun CoG diartikan sebagai sumber kekuatan dan sekaligus kelemahan yang apabila diserang akan melumpuhkan kemampuan tempur lawan secara signifikan. Dalam kajian ini, CoG dinilai berdasarkan fungsi IKN, apakah terbatas sebagai pusat pemerintahan atau berfungsi sekaligus sebagai pusat perekonomian. Kajian ini berasumsi bahwa IKN dengan fungsi ganda memiliki lebih banyak lapisan CoG yang membuatnya lebih rentan menjadi target serangan. Analisis data diarahkan untuk mengidentifikasi kaitan antara CoG dan kerawanan IKN, serta efektivitas pertahanan IKN berdasarkan variasi karakter CoG-nya.

Karakter ancaman IKN dijabarkan berdasarkan target penyerang, bentuk serangan, dan intensitas kekerasan. Target *offender* yang teridentifikasi dari dataset mengacu pada definisi kemenangan perang, yang terdiri atas perubahan rezim, pendudukan, diplomasi koersif, dan target lainnya. Bentuk serangan mengacu pada matra yang digunakan oleh pihak penyerang, apakah darat, laut, udara atau gabungan lebih dari satu matra. Sedangkan intensitas ancaman dibagi ke dalam kategorisasi dari yang tertinggi ke terendah, yaitu agresi, pemberontakan bersenjata, perang saudara, sabotase/teror, dan pelanggaran wilayah. Analisis data diarahkan untuk menemukan kombinasi target *offender*, bentuk serangan, dan intensitas ancaman yang paling sering dihadapi IKN berdasarkan karakter geografi militernya.

Bentuk pertahanan IKN terbagi menjadi tiga, yakni fortifikasi, evakuasi, dan gabungan keduanya atau hibrida. Fortifikasi diamati dari perimeter pertahanan (*lines of defence*) atau gelar militer permanen (*garrison*) yang ditempatkan di luar atau di dalam IKN. Kategori evakuasi dilekatkan pada pertahanan IKN yang lebih menonjolkan penyelamatan pimpinan politik ke wilayah lain atau bahkan ke negara lain, di tengah ketiadaan gelar militer

---

<sup>55</sup> Kajian ini mengakui adanya bias kekinian di mana penilaian kedalaman strategis dilakukan dengan menggunakan alat ukur citra satelit yang dapat diakses publik. Dengan kata lain, analisis tidak mengacu kepada kondisi nyata pada saat pertempuran IKN terjadi. Hal ini tidak terhindarkan mengingat sulitnya mengakses data infrastruktur jalan tiap negara yang mengalami pertempuran pada periode 1910-2021.

yang signifikan untuk mempertahankan IKN. Sedangkan kategori pertahanan hibrida diamati dari gelar militer untuk mempertahankan IKN dan sekaligus rencana evakuasi pemimpin politik antara lain ditandai dengan kemampuan mobilitas strategis dan penunjukan “ibu kota negara darurat” (*wartime capital*). Analisis data bertujuan untuk menghitung efektivitas bentuk pertahanan IKN dengan variasi karakter geografi militer dalam menghadapi kombinasi karakter ancaman utama.

**Bagan 2. Tipologi Faktor Operasional Perang**



Dari 654 perang dalam dataset CoW, seleksi dilakukan dengan mempertahankan perang yang mengalami serangan terhadap IKN. Perang yang tidak melibatkan pertempuran IKN dikeluarkan dari dataset. Secara keseluruhan, dataset baru mencatat sebanyak 152 pertempuran yang melibatkan sebanyak 73 IKN di 67 negara. Dataset terasa kurang berimbang dari segi tipe perang di mana perbandingan antara perang intranegara, konflik antarnegara, dan perang lainnya adalah 78:65:9. Hal ini tidak terhindarkan mengingat dataset awal dari CoW memang didominasi oleh konflik intranegara. Melakukan seleksi lebih lanjut dengan cara pengambilan sampel terencana (*purposive sampling*) untuk mencapai keseimbangan komposisi juga tidak dimungkinkan karena populasi data perang lainnya yang terlalu kecil.

Setelah melengkapi dataset, studi ini menyusun skenario pertahanan IKN dengan memperhatikan dua determinan, yakni geografi militer dan tipe perang terhadap efektivitas pertahanan IKN. Tipe perang diambil karena studi mengadopsi dataset dari *Correlates of War*, sementara geografi

militer dipilih dengan pertimbangan akses data. Persilangan ketiga faktor tersebut menghasilkan delapan pola kemungkinan pertempuran IKN yang kemudian dianalisis dalam bentuk studi kasus. Pemilihan kasus didasarkan pada kelengkapan data yang membantu menjelaskan aktor dan kekuatan militernya, interaksi pertempuran, hingga strategi dari pihak-pihak yang bertempur.

**Tabel 2. Pola Pertempuran Ibu Kota Negara**

Kategori	Subkategori	Pertahanan Gagal	Pertahanan Sukses
Tipe Perang	Antarnegara	A1	B1
	Intranegara	C1	D1
Medan Geografi	Kompleks	A2	B2
	Serupa	C2	D2

Selain dataset pertempuran, studi ini mengumpulkan data IKN darurat, yakni penetapan kota untuk menggantikan sementara fungsi IKN yang telah dikuasai atau direbut lawan dalam keadaan perang atau konflik bersenjata. IKN darurat dipahami dengan mengkaji faktor penetapannya seperti pertimbangan strategis, konstitusional, medan geografi dan kedalaman strategis (dihitung dari jarak antara IKN darurat dan IKN lama), fungsi kota sebelum ditunjuk sebagai IKN darurat (pusat ekonomi/budaya atau lainnya), hingga faktor idiosinkratik (misalnya keinginan pemimpin politik untuk menunjuk kota kelahiran sebagai IKN darurat). Sebanyak 28 IKN darurat dari 17 negara telah diidentifikasi, dengan variasi pertimbangan pemilihan dan mekanisme penetapan. Analisis diarahkan pada identifikasi pertimbangan penetapan IKN darurat yang paling dominan dan korelasi antara pertimbangan penetapan IKN darurat dengan hasil akhir perang.

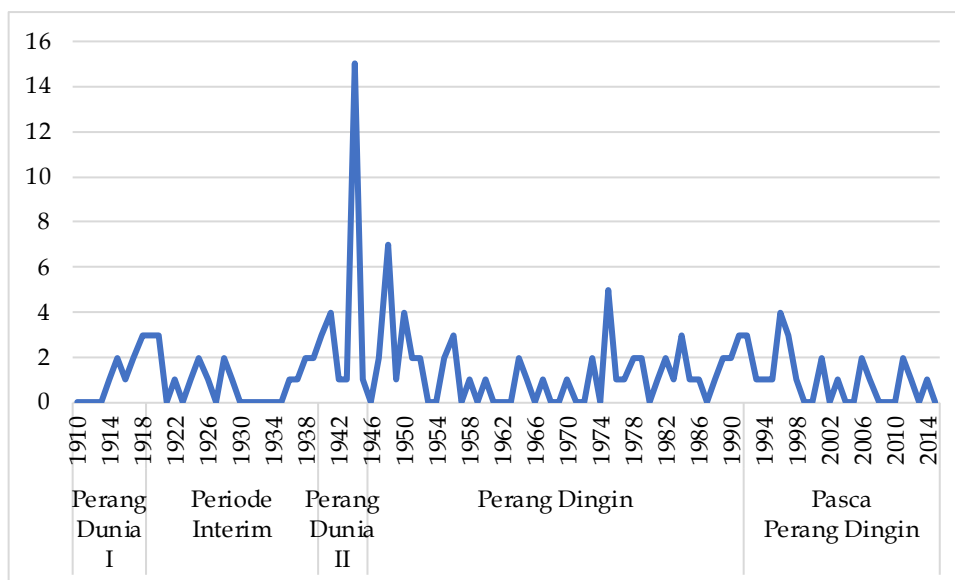
Untuk menyusun rekomendasi strategi pertahanan IKN baru Indonesia, kajian ini mengumpulkan data primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kementerian/lembaga, hasil penelitian universitas dan lembaga pemikir (*think tank*), serta liputan media massa. Selain studi literatur, kami melakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan rencana pemindahan IKN seperti Kementerian Pertahanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

### Pola Pertempuran di Ibu Kota Negara, 1910-2021

Secara umum, analisis atas dataset pertempuran IKN terbagi dalam tiga bagian. Pertama, kecenderungan pertempuran berdasarkan lini masa dan persebarannya menurut kawasan. Kedua, karakteristik IKN yang mengalami pertempuran berdasarkan fungsi dan medan geografi tiap-tiap IKN. Ketiga, pola konflik yang melibatkan IKN dengan menyilangkan tipe perang, inisiator perang, intensitas konflik, bentuk serangan, tujuan serangan, strategi pertahanan, dan karakter geografi, serta efektivitas pertahanan IKN dan *hasil akhir perang*.

Pada periode 1914-2021, ditemukan terdapat 152 kasus penyerangan IKN yang tersebar di lima kawasan dunia. Merujuk pada tahun peristiwanya, terdapat lima momentum politik global utama di mana jumlah serangan terhadap IKN meningkat, yakni Perang Dunia I (1910-1918), Periode Antarperang (1918-1939), Perang Dunia II (1939-1945), Perang Dingin (1947-1991), serta Pasca Perang Dingin (1991-2021). Lonjakan jumlah penyerangan IKN tertinggi terjadi di masa Perang Dunia II. Sedangkan masa Perang Dingin merupakan momentum politik dengan penyerangan IKN terbanyak, hal yang wajar mengingat panjangnya rentang waktu momentum tersebut.

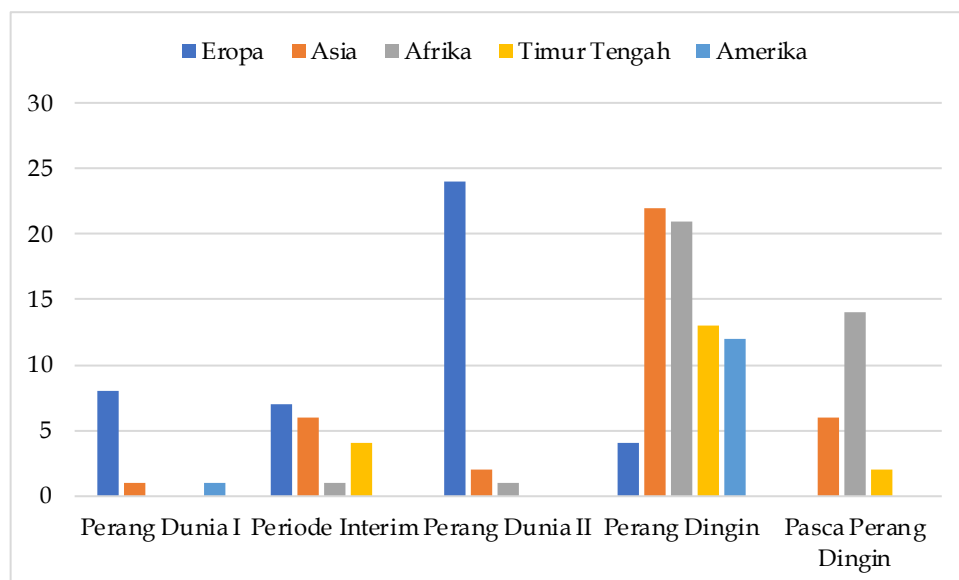
**Bagan 3. Lini Masa Pertempuran Ibu Kota Negara**



Dari segi geografi, dunia dapat dikerucutkan menjadi lima kawasan, yaitu Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Terhitung sejak Perang Dunia I hingga Perang Dunia II, benua Eropa menjadi kawasan yang paling banyak mengalami pertempuran IKN. Hal ini selaras dengan teater perang

yang terletak di benua tersebut dan banyak IKN yang menjadi sasaran penyerangan adalah yang berada di “jalur tembak” antara pihak Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti Helsinki (Finlandia), Sofia (Bulgaria), dan Budapest (Hungaria). Pasca Perang Dunia II, wilayah lain seperti Asia dan Afrika menunjukkan peningkatan jumlah penyerangan IKN yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari perang dekolonisasi di kedua benua tersebut. Penyerangan IKN di Asia didominasi oleh Perang Korea, Indochina, Sri Lanka serta Afghanistan. Sementara penyerangan IKN di Afrika diwarnai oleh perang sipil di berbagai negara seperti Uganda, Chad, dan Liberia.

**Bagan 4. Pola Kawasan Pertempuran Ibu Kota Negara**



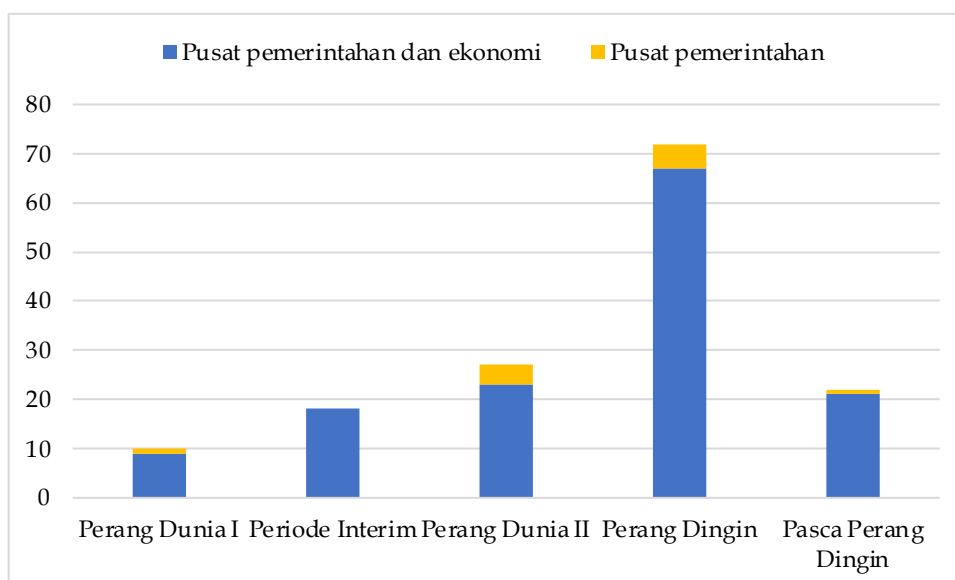
IKN yang paling sering mengalami serangan adalah Helsinki (Finlandia) dan Kabul (Afghanistan) dengan masing-masing enam kali kejadian. Helsinki menghadapi tiga serangan terpisah oleh tiga aktor berbeda pada tahun 1918, 1939, dan 1941 dalam Perang Sipil dan Perang Antarnegara. Sedangkan Kabul diserang oleh lima aktor berbeda dalam tiga jenis perang (Perang Imperial, Perang Sipil, dan Perang Antarnegara) pada tahun 1919, 1928, 1978, dan 2001. Keduanya diikuti oleh Damaskus (Suriah), Roma (Italia), dan N'Djamena (Chad) dengan masing-masing lima kejadian. Untuk Kawasan Asia, IKN yang paling banyak diserang adalah Seoul (Korea Selatan), Pyongyang (Korea Utara), dan Phnom Penh (Kamboja) dengan masing-masing empat kali serangan. Sedangkan Jakarta tercatat belum pernah mengalami serangan setingkat perang sejak Perang Kemerdekaan hingga sekarang.

**Gambar 1. Ibu Kota Negara Dengan Serangan Terbanyak**



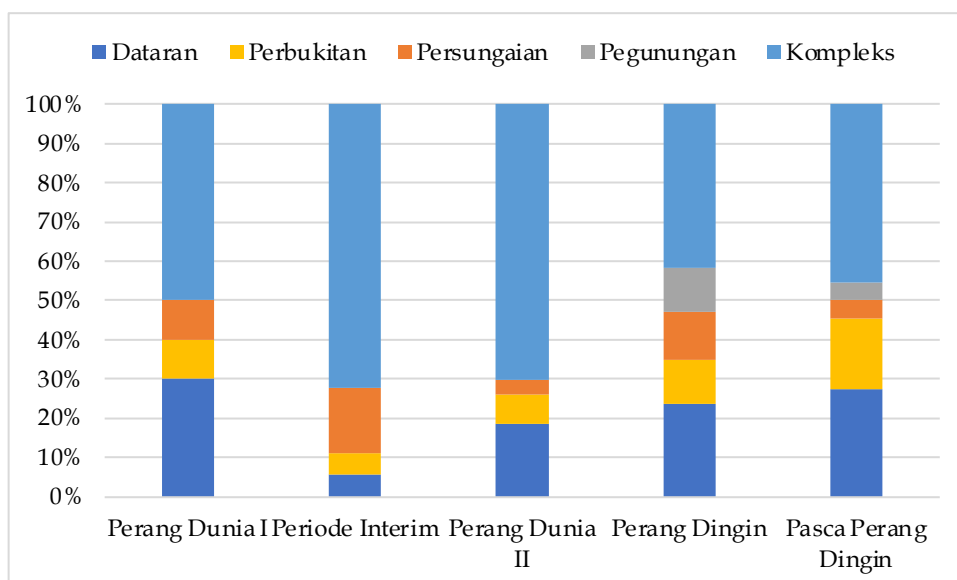
Analisis data menunjukkan kecenderungan bahwa IKN yang memiliki fungsi ganda sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi (138 IKN) jauh lebih banyak diserang, dibandingkan IKN yang hanya berperan sebagai pusat pemerintahan (14 IKN). Kecenderungan ini konsisten pada kelima momentum politik global. IKN yang berfungsi ganda berimplikasi pada CoG yang berkumpul di satu titik serang, sehingga musuh mendapatkan insentif untuk memaksimalkan hasil serangan.

**Bagan 5. Pola Pertempuran Menurut Fungsi Ibu Kota Negara**



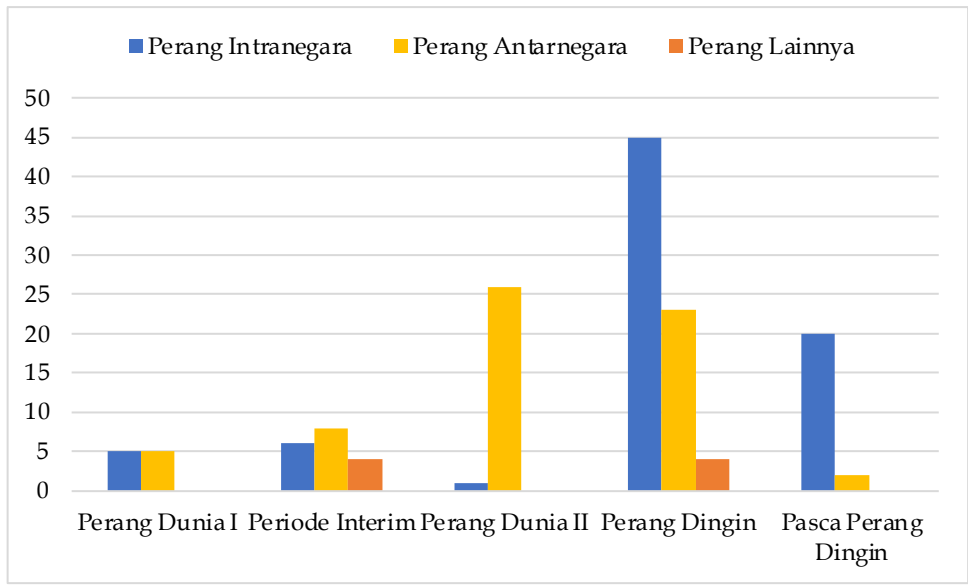
Menurut medan geografinya, lebih dari setengah jumlah IKN yang diserang justru memiliki karakteristik medan geografi yang rumit dengan kombinasi perbukitan, persungai, dan pegunungan. Bahkan, jumlah penyerangan terhadap IKN yang didominasi satu jenis medan geografi, mencakup dataran (32 atau 21%), persungai (11 atau 16%), perbukitan (16 atau 10%), dan pegunungan (9 atau 6%), lebih sedikit dibandingkan jumlah penyerangan terhadap IKN dengan medan geografi kompleks. Kecenderungan ini lagi-lagi konsisten di setiap momentum politik global, membuktikan bahwa medan geografi yang kompleks tersebut tidak menjadi faktor penangkal intensi musuh maupun menjadi halangan untuk menyerang. Demikian, pihak penyerang selalu mendapatkan cara untuk menaklukkan tantangan medan geografi IKN sasaran antara lain dengan memutar arah serangan atau menggunakan teknologi senjata tertentu.

**Bagan 6. Pola Medan Pertempuran Ibu Kota Negara**



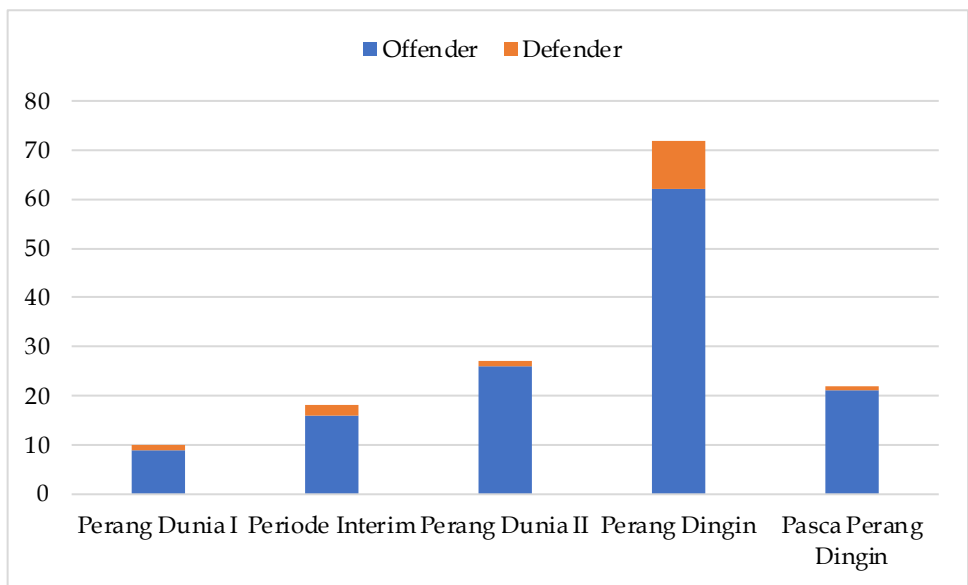
Berdasarkan tipe perang, perang intranegara adalah jenis yang paling banyak menghadirkan serangan terhadap IKN (78 kejadian), disusul perang antarnegara (65 peristiwa) dan perang lainnya (9 insiden). Selama Perang Dunia II, perang antarnegara mendominasi ancaman terhadap IKN, seturut dengan kondisi politik global di masa itu. Sedangkan ancaman yang hadir dari perang intranegara meningkat tajam di masa Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin. Meskipun terdapat ketimpangan data yang didominasi oleh perang intranegara, tidak dapat dipungkiri bahwa penyerangan IKN memang menjadi strategi populer yang dipilih aktor nonnegara untuk mendapatkan pengakuan internasional.

### Bagan 7. Pola Pertempuran Ibu Kota Negara Menurut Tipe Perang



Dilihat dari segi inisiator perang, pihak penyerang IKN merupakan pihak yang dominan dalam menginisiasi perang dengan 89% kejadian. Pola ini cenderung sama di setiap momentum politik global. Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas pihak yang memulai perang memang memiliki intensi dan kapabilitas tinggi untuk menyerang IKN lawan. Sebaliknya, jumlah perang yang diinisiasi oleh pihak yang mempertahankan IKN hanya mencapai 11%.

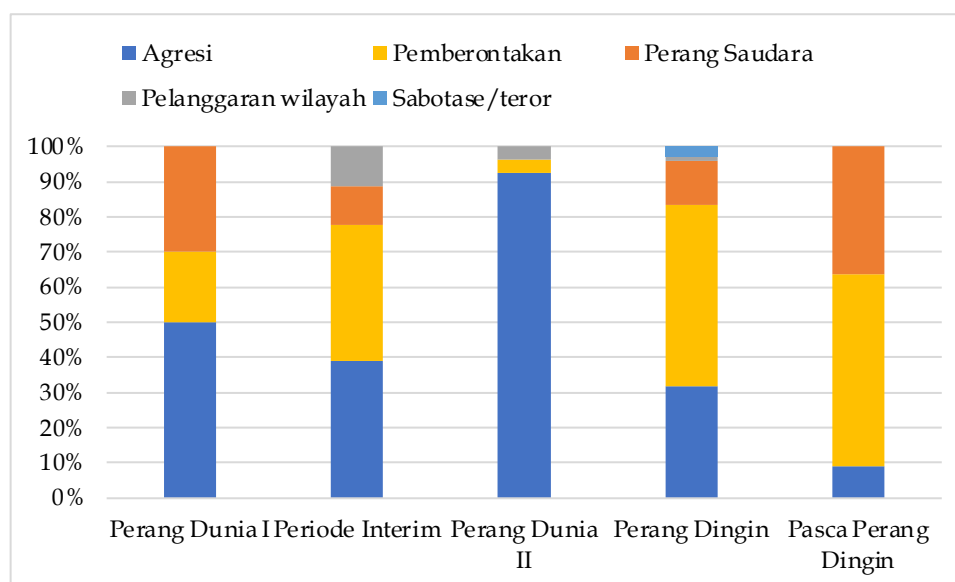
### Bagan 8. Inisiator Pertempuran di Ibu Kota Negara



Pola intensitas konflik bersenjata di IKN dikaji dengan memperhatikan bentuk ancamannya. Serangan terhadap IKN cenderung didominasi oleh agresi militer sebanyak 64 kejadian. Bentuk ancaman ini cenderung terjadi

pada saat Perang Dunia II (1939-1945) serta rangkaian Perang Korea (1950-1953). Selanjutnya adalah pemberontakan bersenjata sebanyak 59 kejadian (39%), yang kebanyakan terjadi di Afrika dan Timur Tengah seperti rangkaian Perang Somalia (1988-2008), Perang DRC (1964-1997), Perang Burundi (1992-2003), Perang Chad (1980-2006), dan sebagainya. Kemudian, perang saudara sebanyak 23 kejadian (15%) sebagian besar terjadi pada perang dengan tujuan perubahan rezim, seperti Perang Tajikistan (1992-1997), Perang Libya Pertama (2011-2012), dan Perang Vietnam Fase Kedua (1965-1975). Pemberontakan dan Perang Saudara cenderung menjadi tren ancaman terhadap IKN setelah Perang Dunia II, selaras dengan tren pola pertempuran yang bergeser menjadi perang intranegara. Dua terakhir adalah pelanggaran wilayah sebanyak 4 kejadian (2,6%), dengan kasus Perang Teluk (1990-1991), Perang Russo-Polish (1919-1920), Perang Lithuanian-Polish (1920), dan Perang Russo-Finnish (1939-1940), serta sabotase/teror sebanyak 2 kejadian (1,3%), dengan kasus Perang Namibia (1975-1988) dan Perang Shining Path (1982-1992).

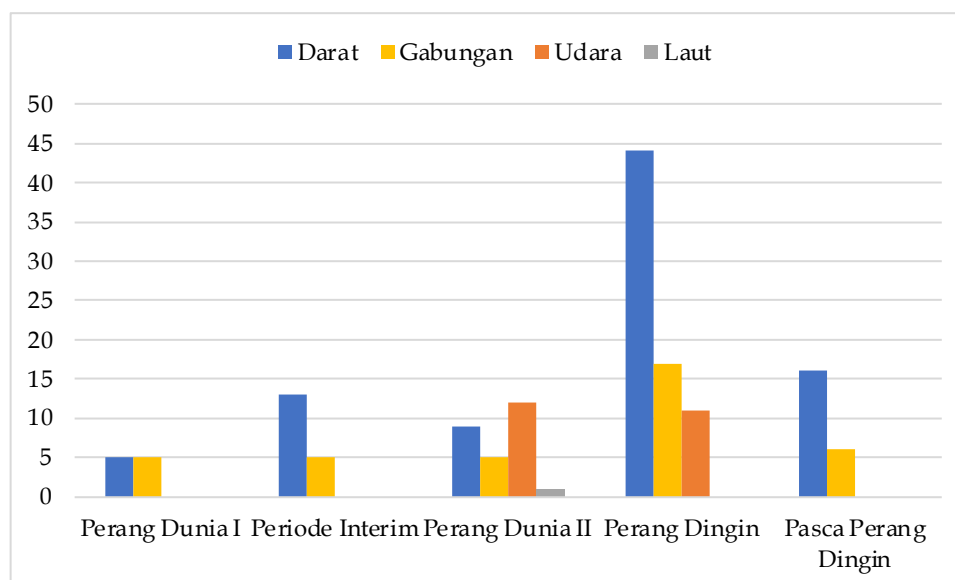
**Bagan 9. Bentuk Ancaman Terhadap Ibu Kota Negara**



Menurut bentuk serangan yang didasari oleh keterlibatan matra darat, laut, dan udara, serangan terhadap IKN lebih banyak menggunakan satu matra saja, dibandingkan dengan operasi gabungan. Penyerangan darat menjadi yang terbanyak dilakukan dengan 88 kejadian (58%), sehingga dapat disimpulkan bahwa matra ini merupakan kekuatan tumpuan pihak penyerang dalam pertempuran IKN. Data ini diperlihatkan dengan kasus-kasus seperti perang saudara Spanyol (1936), perang Soviet-Finlandia (1919), juga 8 (delapan) serangan IKN dalam rangka Perang Dunia II, dan sebagainya. Serangan darat cenderung menjadi tren ketika dunia tidak

dalam kondisi Perang Dunia, terlihat dari proporsi serangan darat yang besar di Periode Interim, Perang Dingin serta Pasca Perang Dingin. Hal ini dipengaruhi oleh jenis perang intranegara yang melibatkan aktor-aktor nonnegara yang tidak memiliki kemampuan penyerangan yang mumpuni di domain lain seperti udara dan laut. Kemudian, penyerangan disusul oleh matra udara dengan 23 serangan (15%) layaknya dalam perang Arab-Israel, Perang Teluk, Perang Iran-Irak, dan lainnya yang didominasi oleh tujuan diplomasi koersif. Sedangkan penyerangan matra laut hanya ditemukan satu serangan (1%) pada penyerangan kota Oslo, Norwegia, oleh Jerman pada masa Perang Dunia II. Dalam serangan gabungan, kombinasi matra darat dan udara adalah yang terbanyak dikerahkan. Contoh penyerangan tersebut dapat dilihat dari seluruh penyerangan IKN dalam rangka Perang Dunia I.

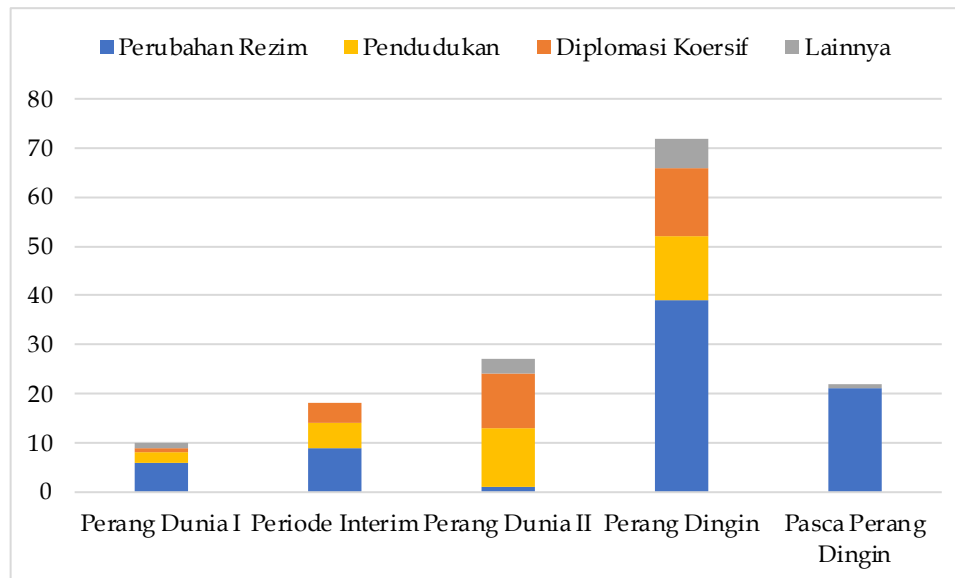
**Bagan 10. Pola Serangan Terhadap Ibu Kota Negara**



Selain bentuk serangan, variasi juga terdapat pada tujuan penyerangan IKN. Lebih dari setengah penyerangan bertujuan untuk mengganti rezim dengan 78 kejadian (51%). Penyerangan dengan tujuan yang demikian banyak terjadi di luar momentum Perang Dunia II, seperti dapat dilihat pada Perang Sipil Rusia (1917-1921), Anti-reformasi Afghan Kedua (1928-1929), Perang Sudan Selatan Pertama (1963-1972), dan sebagainya. Tujuan ini disusul pendudukan dengan 32 kejadian (21%) -seperti Invasi Soviet ke Hungaria (1956), Perang Timor Timur Fase Kedua (1975-1976), Perang Korea (1950-1953)- dan diplomasi koersif -seperti Perang Kontrol Angola (1976-1991), Perang Russo-Finnish (1939-1940), Perang Inggris-Palestina (1936-1938) dengan 31 kejadian (21%). Kedua tujuan tersebut hadir dengan persentase yang signifikan pada momentum Perang Dunia II, berkaitan

dengan jenis peperangan antarnegara yang mendominasi periode tersebut.

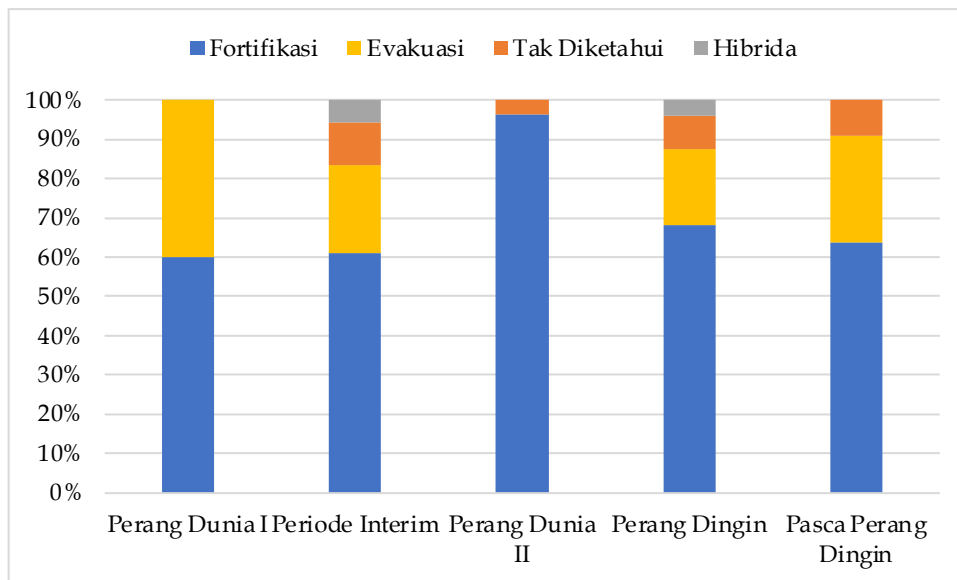
**Bagan 11. Tujuan Serangan Terhadap Ibu Kota Negara**



Dalam menghadapi berbagai bentuk dan tujuan serangan, strategi pertahanan IKN terbagi atas fortifikasi, evakuasi, atau hibrida. Fortifikasi menjadi pilihan paling populer (70%) dengan pola konsisten di setiap periode. Salah satu penerapan fortifikasi tradisional dilakukan oleh Tiongkok dalam menanggapi serangan oleh Jepang terhadap Nanjing dalam Perang Sino-Jepang ketiga (1939). Kecenderungan fortifikasi meningkat tajam di masa Perang Dunia II, berkelindan dengan pola tujuan serangan pendudukan dan diplomasi koersif.<sup>56</sup> Pilihan fortifikasi kemungkinan besar terkait dengan simbol penguasaan IKN sebagai kemenangan perang. Setelah fortifikasi, preferensi strategis pertahanan IKN berikutnya adalah evakuasi (20%). Sebagai contoh adalah peristiwa penyerangan Seoul (1950) oleh Korea Utara yang mendorong pemerintahan Korea Selatan untuk evakuasi ke pusat ekonomi Busan. Dalam kasus-kasus tertentu, strategi pertahanan IKN juga dapat berupa gabungan keduanya atau hibrida (2%).

<sup>56</sup> Sebagai contoh fortifikasi Perang Dunia II adalah Garis Maginot di Perancis. Garis Maginot merupakan fortifikasi sepanjang 280 mil dalam bentuk pendirian lusinan benteng militer, bunker dalam tanah, area ranjau, dan artileri yang menelan biaya setara dengan sembilan miliar dolar AS. Meski demikian, Garis Maginot terbukti tidak efektif melawan musuh dengan kemampuan mobilitas tinggi.

## Bagan 12. Pola Strategi Pertahanan Ibu Kota Negara



Pola pertempuran IKN juga dianalisis berdasarkan geografi militer yang diperhitungkan berdasarkan dua faktor utama, yaitu kompleksitas medan geografi (*terrain*) dan kedalaman strategis (*strategic depth*). Dengan menggabungkan kedua faktor tersebut pada Bagan 13, mayoritas IKN yang diserang memiliki karakter jarak ke perbatasan darat dan laut yang cukup dekat dengan kompleksitas medan geografi yang bervariasi. Meskipun demikian, terdapat IKN dengan medan geografi yang kompleks yang juga jauh dari perbatasan darat maupun laut, seperti Chongqing dan Addis Ababa.

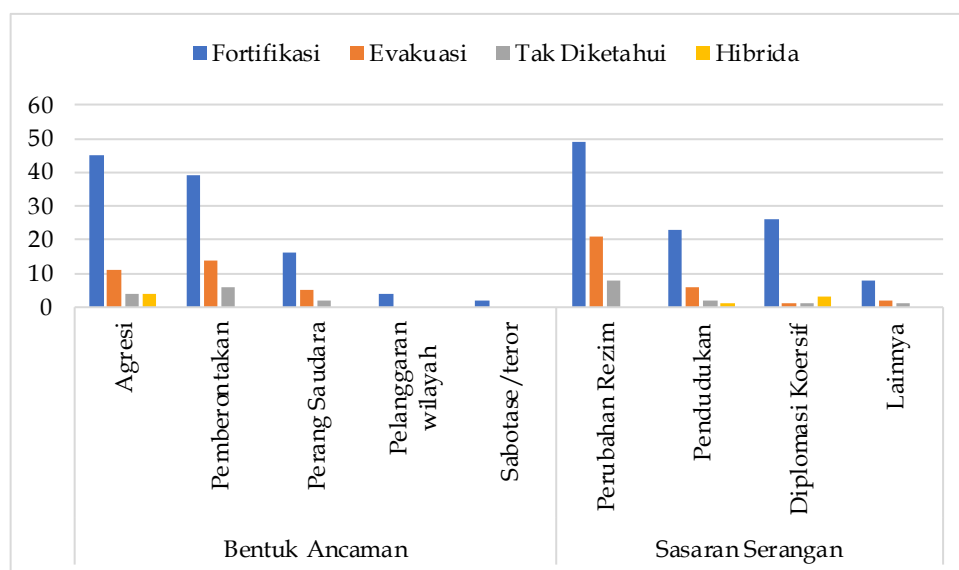
**Tabel 3. Pola Penyerangan Ibu Kota Negara Menurut Bentuk Ancaman dan Tujuan Serangan**

Kategori	Perubahan Rezim	Pendudukan	Diplomasi Koersif	Lainnya
Agresi	9	26	25	4
Pemberontakan	50	5	1	3
Perang Saudara	18	0	1	4
Pelanggaran wilayah	0	1	3	0
Sabotase/teror	1	0	1	0



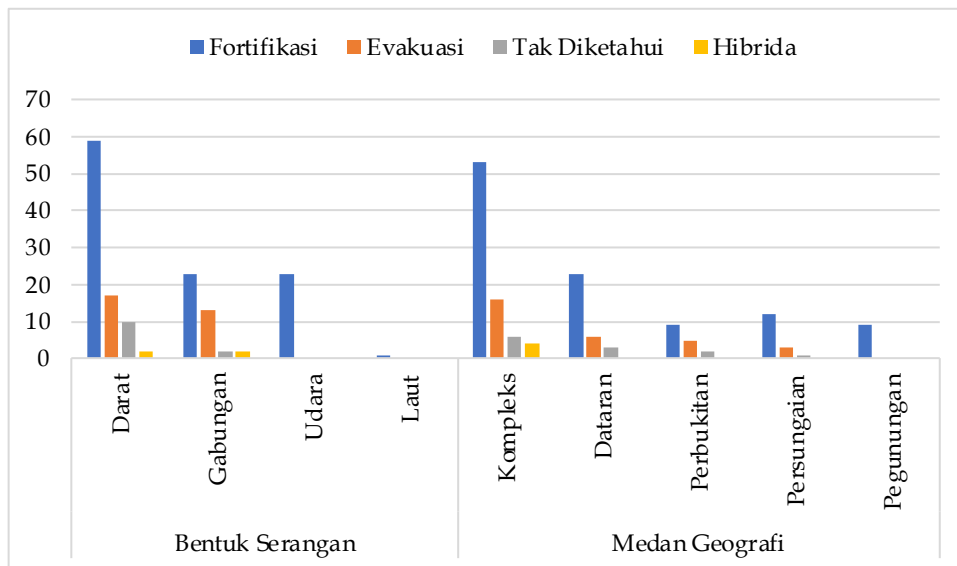
Strategi pertahanan IKN yang diimplementasikan cenderung berbentuk fortifikasi, terlepas dari variasi bentuk ancaman dan sasaran serangan. Preferensi fortifikasi juga dapat dilihat pada kasus dengan bentuk ancaman maupun sasaran serangan terpopuler, seperti penyerangan IKN Yugoslavia, Beograd, pada masa Perang Dunia I yang menunjukkan irisan antar ketiganya. Agresi oleh Austro-Hungaria terhadap Beograd pada 29 Juli 1914 bertujuan untuk mengambil-alih hingga mengubah rezim Yugoslavia. Walaupun sempat terpukul mundur, Yugoslavia memenangkan perang dengan membentuk garis pertahanan sebagai bentuk fortifikasi.

**Bagan 14. Pola Strategi Pertahanan Ibu Kota Negara Menurut Bentuk Ancaman dan Tujuan Serangan**



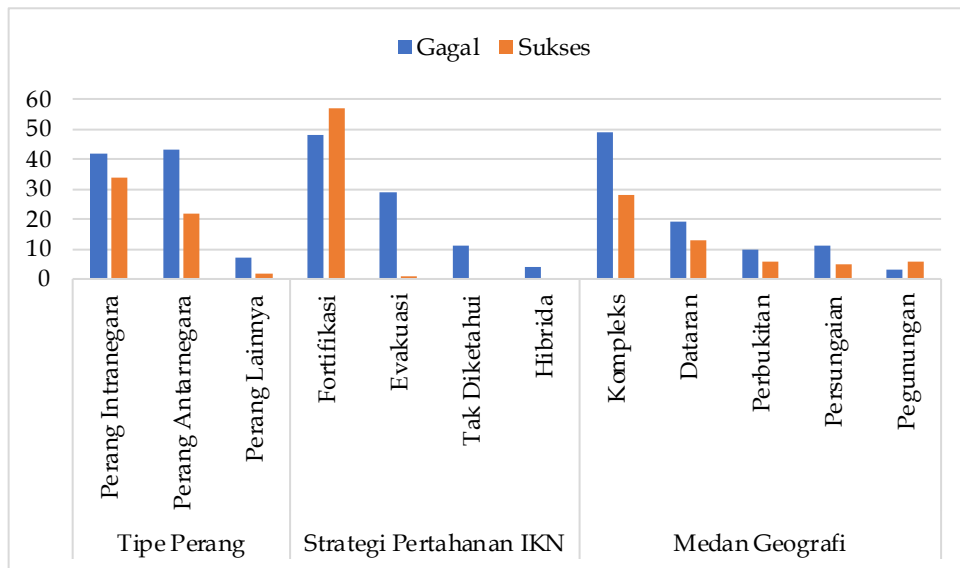
Sebagian besar kejadian merupakan kombinasi pengerahan matra darat pada medan geografi yang kompleks dan, pada jumlah yang lebih kecil, kombinasi matra gabungan pada medan geografi yang sama. Bentuk pertahanan fortifikasi tetap menjadi preferensi utama, terlepas dari kombinasi jenis medan geografi maupun matra penyerang. Dominasi strategi fortifikasi paling terlihat pada medan geografi kompleks yang diserang oleh matra darat, seperti pada rangkaian Pertempuran Monte Cassino Pertama hingga Ketiga (1944). Pertahanan IKN dilakukan dengan membangun tiga rangkaian garis pertahanan yang mencakup Gustav Line, Bernhardt Line, dan Hitler Line.

**Bagan 15. Pola Strategi Pertahanan Ibu Kota Negara Menurut Bentuk Serangan dan Medan Geografi**



Analisis kesuksesan dan kegagalan pertahanan IKN juga dinilai berdasarkan tipe perang, strategi pertahanan, dan medan geografi, sebagaimana digambarkan dengan Bagan 16. Rasio sukses pertahanan IKN pada perang intranegara adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe perang lainnya, yang diilustrasikan melalui Perang Paraguay (1947), Perang Khmer Rouge (1971-1973), dan Perang Lebanon Kedua (1975-1976). Strategi fortifikasi tentu relatif lebih sering sukses dibandingkan strategi lainnya seperti evakuasi atau gabungan, namun tetap tidak signifikan dengan perbandingan antara 57 kasus sukses (54%) dengan 48 kasus gagal (46%). Sedangkan pertahanan IKN pada medan geografi pegunungan adalah satu-satunya yang mencatat frekuensi sukses lebih banyak daripada gagal. Pertahanan tersebut dapat ditemukan di Perang Guatemala Pertama hingga Ketiga (1966-1984), Perang El Salvador (1979-1992), dan Perang Iran-Irak (1980-1988).

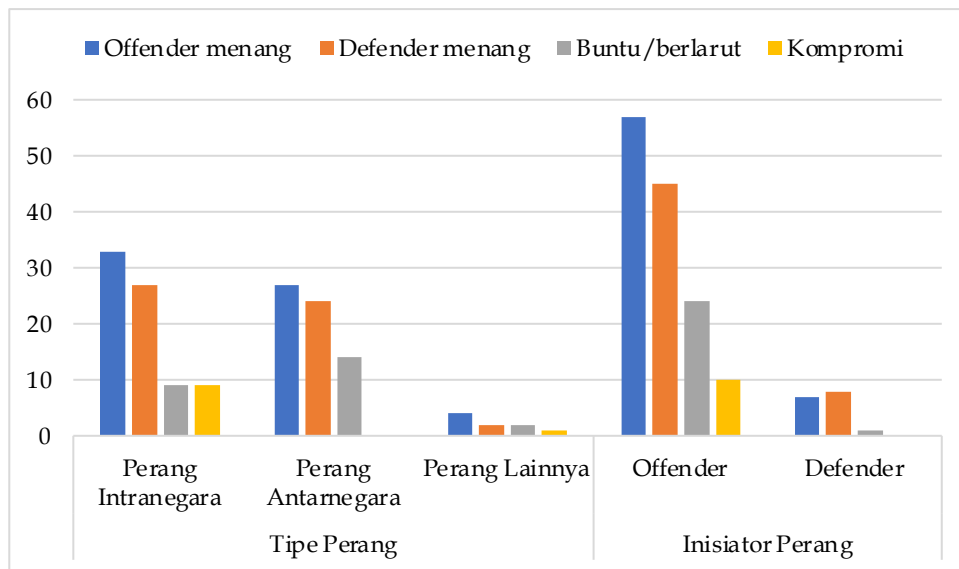
**Bagan 16. Pola Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara**



Analisis berikut memperlihatkan pola *hasil akhir perang* berdasarkan tipe perang dan inisiator perang sebagaimana diilustrasikan pada Bagan 17. Berdasarkan pihak yang menginisiasi perang, ditemukan bahwa *offender* IKN lebih sering memenangkan perang daripada *defender* IKN. Pola ini dijumpai di semua jenis perang, baik intranegara, antarnegara, maupun lainnya. Akan tetapi ketika diteliti lebih lanjut, dalam kondisi dimana *offender* menginisiasikan perang, *offender* memenangkan perang pada 41% kejadian (57 kasus) dibandingkan *defender* pada 33% (45 kejadian). Sebanyak 34 kasus lainnya ditemukan berakhir dalam kebuntuan/berlarut atau kompromi. Salah satu contohnya diperlihatkan dalam kasus penyerangan terhadap Budapest (1944), Hungaria, pada Perang Dunia II oleh Jerman dan Uni Soviet bersama Romania. Walaupun diserang dalam dua waktu yang berbeda oleh *offender* yang berbeda, Hungaria kerap mengalami kekalahan.

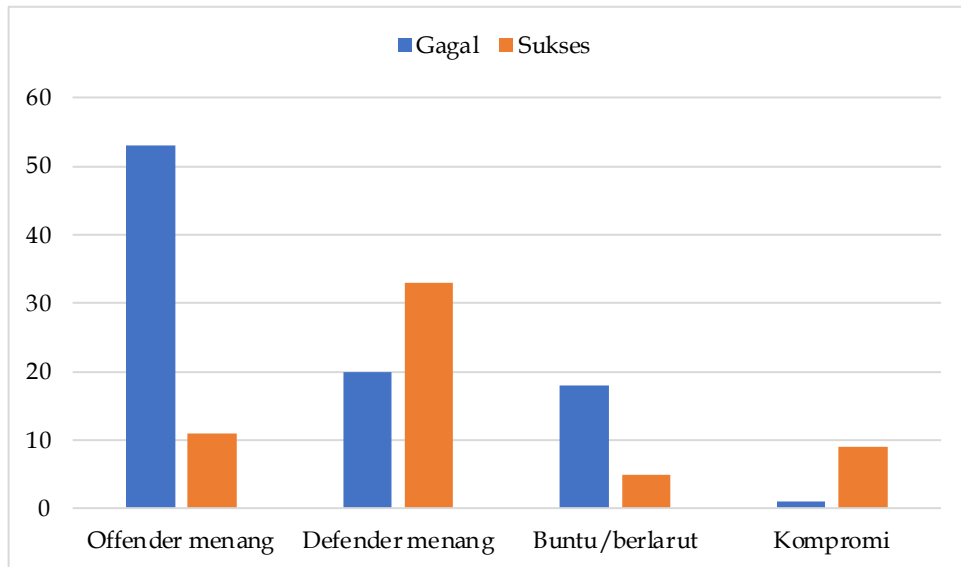
Sedangkan dalam kondisi dimana *defender* menginisiasikan perang, kemenangan yang diraih oleh *defender* sejumlah 50% (8 kasus) dan hanya 43% (7 kasus) yang dimenangkan oleh *offender*. Satu kasus lainnya ditemukan berakhir dalam kebuntuan/berlarut. Sebaliknya, kasus perang Nejd-Hejaz kedua (1924) yang diinisiasi oleh *defender* memperlihatkan penyerangan terhadap Mekkah dan Jeddah yang berujung pada kemenangan *defender*. Walaupun demikian, terdapat kasus layaknya fase kedua perang Vietnam (1965) yang diinisiasi oleh *defender* dan dimenangkan oleh *offender* ataupun kasus perang sipil Somalia ketiga (2006) yang diinisiasi oleh *offender* tetapi dimenangkan oleh *defender*.

**Bagan 17. Pola Hasil Akhir Perang Yang Melibatkan Ibu Kota Negara**



Analisis silang antara hasil akhir perang dan efektivitas pertahanan IKN pada Bagan 18 menunjukkan bahwa pihak penyerang yang memenangkan perang adalah juga pemenang pertempuran IKN (82%). Kasus demikian dapat ditemukan pada saat Perang Pasifik dalam pengeboman oleh Amerika Serikat atas Tokyo dari tahun 1942 hingga 1945. Sedangkan pada kasus *defender* yang memenangkan perang, sebanyak 62% berhasil mempertahankan IKN, seperti Pertempuran Damaskus pada Perang Sipil Suriah (2012). Selain itu, (terdapat juga kasus dimana ketika *offender* berhasil memenangkan perang, namun pertempuran di IKN dimenangkan oleh pihak yang diserang. Hal tersebut dicerminkan dari Pertempuran Paris pada Perang Dunia II (1944), ketika pertempuran di IKN dapat dimenangkan oleh Perancis sebagai pihak *offender* dengan berhasil mengambil alih kembali Paris, yang mana pada saat itu sedang dikuasai oleh Jerman. Temuan ini menunjukkan bahwa kemenangan perang bagi *offender* berkorelasi positif dengan keberhasilan menguasai IKN lawan. Sedangkan pada *defender*, kemenangan perang juga berkorelasi dengan keberhasilan mempertahankan IKN.

### Bagan 18. Pola Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara dan Hasil Akhir Perang

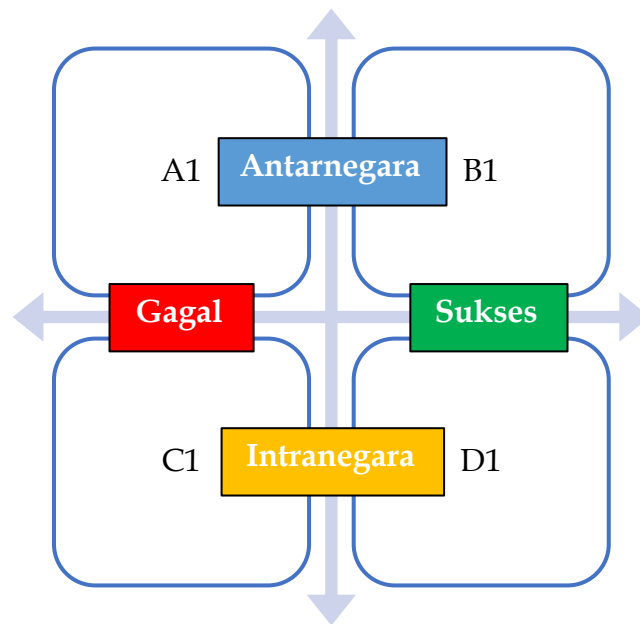


#### Studi Kasus Pertempuran Ibu Kota Negara

Berangkat dari pola pertempuran IKN dan pemilihan IKN darurat, laporan ini melakukan studi kasus berdasarkan persilangan antara tipe perang dan medan geografi dengan hasil pertahanan IKN. Tujuannya adalah untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan strategi pertahanan IKN. Mengacu pada bagan di bawah ini, studi kasus yang dipilih meliputi Pertempuran Britania di masa Perang Dunia II (1939-1945) di kuadran B1, Perang Lebanon Pertama (1958) di kuadran D1, Perang Yugoslavia di masa Perang Dunia I (1914-1915) di kuadran A1, dan Perang Sipil Libya Pertama (2011) di kuadran C1.

Negara yang mengalami perang antarnegara dan sukses mempertahankan IKN-nya dapat dilihat dalam peristiwa Pertempuran Britania yang terjadi dalam rentang waktu Perang Dunia II. Perang diinisiasi oleh Jerman dengan intensi menghancurkan daya juang bangsa Inggris dan mendorong pemerintahnya untuk menandatangani perjanjian damai, dengan cara memaksakan dominasi atas kawasan udara Inggris (*air superiority*). Penyerangan terhadap London dilakukan di bawah komando Herman Göring, sementara pertahanan IKN dipimpin oleh Marsekal Hugh Dowding.

### Bagan 19. Tipe Perang dan Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara



Pertempuran Britania berlangsung sekitar empat bulan mulai dari 10 Juli 1940 sampai 31 Oktober 1940, dan terbagi atas lima fase.<sup>57</sup> Fase pertama menandai dimulainya pertempuran ketika Angkatan Udara Jerman menyerang Selat Inggris. Enam hari kemudian Hitler memerintahkan persiapan Operasi “Sea Lion” untuk menginvasi Inggris. Memasuki fase kedua, Inggris menggunakan strategi fortifikasi untuk menahan gempuran bom Jerman. Fase ketiga menjadi titik balik Pertempuran Britania ketika Inggris membalas Jerman dengan mengebom Berlin. Memasuki fase keempat, “Kampanye Blitz” terhadap Inggris dimulai. Di sisi lain, Inggris pun telah mempersiapkan serangan balasan ke Jerman. Intensnya serangan balasan Inggris membuat Hitler menunda Operasi “Sea Lion”. Pada 31 Oktober 1940, Hitler membatalkan rencana invasi ke Inggris dan Pertempuran Britania berakhir. Bom yang dijatuhkan Angkatan Udara Jerman ke Inggris tidak hanya menghancurkan markas *Royal Air Force* (RAF) tetapi juga menysasar pada gudang produksi pesawat tempur. Namun, tersebaranya gudang pesawat tempur menyebabkan RAF memiliki persebaran kekuatan yang merata. Sehingga ketika terdapat gudang yang dihancurkan, Inggris masih memiliki simpanan persenjataan.

Melalui strategi pertahanan yang membagi RAF menjadi lima skuadron dan landasan terbang, serta sistem Dowding yang memungkinkan RAF untuk menerima peringatan dini apabila terdapat pesawat tempur yang

<sup>57</sup> Winston S. Churchill, “Introduction to the Phases of the Battle of Britain,” Royal Air Force Museum, <https://www.rafmuseum.org.uk/research/online-exhibitions/history-of-the-battle-of-britain/introduction-to-the-phases-of-the-battle-of-britain/> (diakses pada tanggal 22 Mei 2022).

mendekat, tentara Inggris berhasil memaksimalkan pertahanan nasional.<sup>58</sup> Hal-hal tersebut yang juga ikut dibarengi dengan alur komando dan kendali yang jelas dalam RAF menjadi faktor-faktor kontribusi berhasilnya pasukan militer Inggris dalam mempertahankan London.

Perang yang dijadikan studi kasus dengan perang intranegara dan kesuksesan pertahanan IKN adalah Perang Lebanon Pertama. Konflik bermula dari krisis politik di Lebanon yang disebabkan oleh adanya kecenderungan keberpihakan rezim Chamoun, yang didominasi oleh etnis Maronit Kristen, terhadap AS. Hal ini diperkeruh dengan keterlibatan *United Arab Republic* (UAR) dalam pertempuran IKN. Chamoun merespons dengan permintaan intervensi AS ke Beirut untuk meredam gerakan pemberontak.

Perang yang juga dikenal sebagai krisis Lebanon ini terjadi pada 15 Juli sampai 25 Oktober 1958 dan merupakan pertempuran yang menitikberatkan pada operasi pendaratan amfibi Amerika Serikat oleh Batalion Tim Pendarat di pelabuhan Beirut dan *Task Force* 201 di bandar udara Beirut. Intervensi yang dilakukan AS tersebut bertujuan untuk mencegah upaya kelompok oposisi, yang mendapat bantuan dari negara lain, untuk menggulingkan rezim Chamoun serta mempertahankan hegemoni AS di kawasan Timur Tengah. Operasi AS di Beirut diberi sandi "Operation BLUEBAT". Seluruh satuan militer dari tiap matra, yang terdiri dari *Second Provisional Marine Force*, *United States Navy's Sixth Fleet*, *Composite Air Strike Force*, dan *Task Force* 201 tergabung dalam *United States Specified Command Middle East* (USSPECOMME), di bawah komando Laksamana James L. Holloway, Jr.<sup>59</sup>

Dalam upaya menangkal serangan AS terhadap IKN, sebanyak 400-2.000 pihak pemberontak melakukan strategi pertahanan fortifikasi di bawah komando Saeb Salem, yang juga merupakan perdana menteri Lebanon. Fortifikasi diimplementasikan melalui penetapan Basta sebagai markas besar pertahanan IKN milik pihak pemberontak. UAR, di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasser, ikut mengerahkan 40.000 pasukan dari *Syrian First Army* serta 200 tank T-34 buatan Soviet.<sup>60</sup> Besarnya porsi pasukan dari Suriah inilah yang mendasari salah satu objektif AS untuk mengamankan wilayah utara Beirut.

---

<sup>58</sup> Andy Saunders, *RAF Fighters vs Luftwaffe Bombers* (Oxford: Osprey Publishing, 2020), hlm. 37-39.

<sup>59</sup> Brian A. Jaquith, (2019). "Operation Blue Bat, 1958: Framing Activities in Crisis Response, " *Leavenworth: School of Advanced Military Studies*, (2019), hlm. 3.

<sup>60</sup> Jack Shulimson, "Marines in Lebanon 1958," *Washington D.C.: U.S. Marine Corps*, (1966), hlm. 11.

Perang di Lebanon pada periode ini dapat dikatakan berakhir dengan kemenangan yang diraih pihak pemberontak dalam keberhasilan mengamankan wilayah IKN dan memukul mundur pasukan AS dari Lebanon yang membuat objektif politik AS untuk mempertahankan rezim Chamoun gagal untuk dicapai. Kemenangan tersebut diraih pada September 1958 ketika Presiden Chamoun memutuskan untuk mengakhiri periode kepemimpinannya dan digantikan oleh Mayor Jenderal Fouad Chehab yang cenderung tidak memihak AS maupun UAR.

Penyerangan terhadap Yugoslavia di Perang Dunia I menjadi kasus perang antarnegara yang gagal untuk dipertahankan. Penyerangan ini dimulai pada 7 Oktober 1915 ketika pasukan Austro-Hungaria dan Jerman mulai menyerang Beograd, IKN dari Serbia, melalui penyeberangan sungai Danube dan Sava. Tujuan serangan Jerman, Austro-Hungaria, dan nantinya Bulgaria adalah untuk menguasai seluruh wilayah Beograd sebagai lapis pertahanan paling luar dari Serbia, dan untuk mengamankan hub atau jalur komunikasi antara ketiga negara tersebut dengan Turki, yaitu Niš.<sup>61</sup>

Setelah Beograd berhasil dikuasai pada 9 Oktober 1915, pusat pemerintahan dan IKN Serbia dipindahkan ke Niš, yang memiliki perbedaan jarak sejauh 273 kilometer. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan nilai strategis dan nilai historis. Niš bukan hanya menjadi pusat kendali komando, pusat industri dan markas besar militer dari Serbia, namun sebelumnya juga pernah menjadi IKN pada saat masa pemerintahan Pangeran Stefan Nemanja (1166-1196).<sup>62</sup> Akibat terjadinya perpindahan IKN tersebut, Niš menjadi target ofensif pasukan Jerman dan Bulgaria setelah Beograd jatuh. Sebelumnya, strategi pertahanan IKN di Beograd merupakan gelar artileri yang dipasok oleh Perancis dan Rusia, seperti artileri ringan dan berat, meriam kapal serta meriam anti-pesawat, di sepanjang sungai Sava dan Danube.<sup>63</sup> Sedangkan pertahanan di Niš dilakukan dengan menggelar pasukan di wilayah sekitar, seperti Zahecar, Knjazevac, dan Pirot.<sup>64</sup> Strategi pertahanan di kedua kota dilakukan di bawah komando yang sama, yakni Marsekal Radomir Putnik. Meskipun memiliki strategi pertahanan IKN dan kendali komando yang solid, namun sumber daya pasukan Serbia telah seluruhnya dikerahkan dan terjadi kekurangan pasukan cadangan.

---

<sup>61</sup> Richard L. DiNardo, *Invasion: The Conquest of Serbia, 1915*, (California: Praeger, 2015), hlm. 58.

<sup>62</sup> "About Niš", Erasmus Student Network Serbia, <https://esn.rs/about-city-nis> (diakses pada tanggal 22 Mei 2022).

<sup>63</sup> Richard L. DiNardo, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>64</sup> Richard L. DiNardo, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Sehingga, Beograd dan Niš gagal untuk dipertahankan dan berhasil dikuasai musuh per 5 November 1915.

Terakhir, Perang Sipil Libya Pertama menjadi studi kasus di mana IKN gagal dipertahankan pada perang intranegara. Perang diawali dengan adanya intensi dari *National Transitional Council* (NTC) untuk melengserkan Muammar Khadafi dan mengambil alih kekuasaan pusat di IKN. Pasukan loyalis Khadafi mempertahankan IKN pada perang yang terjadi di Tripoli dari 20 Agustus hingga 28 Agustus 2011 ini. Strategi penyerangan dilakukan dengan pengepungan (*encirclement*) terhadap wilayah-wilayah strategis di sekitar Tripoli, seperti Zawiya, Tajura, Suq al-Jumaa, Arada, al-Sabaa, Janzur, dan jembatan Gharyan.<sup>65</sup> Pihak pemberontak, Brigade Tripoli di bawah komando Kolonel Mahdi al-Harati, berhasil menguasai 90% dari wilayah IKN pada 22 Agustus 2011. Penyerangan juga dibantu oleh NATO yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Charles Bouchard melalui rangkaian serangan udara terhadap tank, artileri, dan beberapa fasilitas militer.<sup>66</sup>

Dalam merespons penyerangan terhadap IKN, pihak loyalis melakukan evakuasi tanpa perlawanan yang berarti. Brigade Khamis yang memimpin pertahanan pasukan loyalis, ditempatkan di bawah komando Khamis Khadafi yang merupakan putra ketujuh dan bagian dari lingkaran dalam Khadafi. Setelah Khadafi melarikan diri selama penyerangan terhadap IKN, posisinya kemudian diwakilkan kepada Moussa Ibrahim yang berperan sebagai juru bicara Khadafi. Upaya pertahanan terakhir dilakukan di markas loyalis di Salaheddin dan bertahan selama tujuh jam sebelum akhirnya pihak pemberontak berhasil menguasai Tripoli secara sepenuhnya pada 28 Agustus 2011. Khadafi beserta pasukan loyalis mundur ke kota kelahiran Khadafi, Sirte, yang segera dideklarasikan sebagai IKN baru.

Meskipun memiliki jarak sejauh 479 kilometer dari IKN sebelumnya, Sirte tetap menjadi sasaran penyerangan selanjutnya. Objektif penyerangan NTC berkembang tidak berhenti pada penggulingan rezim Khadafi saja, tetapi juga menggantinya ideologi negara dengan demokrasi dan hukum Islam. Penyerangan dimulai dengan pengepungan pada 15 September 2011 oleh NTC dari batas luar kota Sirte. Meskipun pihak defender tetap mengutamakan evakuasi, dengan mengungsikan Khadafi keluar dari Sirte, namun loyalis lebih menunjukkan perlawanan terhadap NTC di penyerangan ini dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya di Tripoli. Upaya pertahanan tersebut dipimpin oleh keponakan sekaligus bagian dari

---

<sup>65</sup> M. Cherif Bassiouni, *Libya, from Repression to Revolution: A Record of Armed Conflict and International Law Violations*, (Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2013), hlm. 755.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 752.

lingkar dalam Khadafi, Abdel Rahman Abdel Hamid. Adanya nepotisme dalam kendali komando pasukan Khadafi serta kalahnya besaran jumlah pasukan Khadafi dari NTC membuat IKN Libya gagal untuk dipertahankan. Maka daripada itu, setelah beberapa kali upaya penyerangan, NTC pada akhirnya berhasil menguasai Qasr Abdul Hadi, kemudian seluruh wilayah Sirte, dan membunuh Khadafi pada 20 Oktober 2011.

Melalui pendalaman empat studi kasus di atas, dapat ditarik beberapa pembelajaran (*lesson learned*). Dalam mempertahankan IKN, diperlukan adanya sistem kendali komando dan strategi pertahanan yang disusun secara solid serta koheren. Misalnya, dalam Pertempuran Britania, terdapat penguatan komando udara (*air command*) yang mampu mencegah musuh dalam melakukan dominasi udara terhadap Inggris. Selain itu, sistem Dowding pada perang ini membuktikan bahwa peningkatan kemampuan pengintaian yang mendukung sistem deteksi dini berperan penting dalam memberikan waktu bagi *defender* IKN untuk bersiap dalam melakukan serangan balasan atau bahkan menginisiasi serangan ofensif lebih dulu. Terkait dengan logistik pertahanan, persebaran industri militer dan pertimbangan perencanaan sumber daya pertahanan serta mobilisasi komponen cadangan secara matang nyatanya menjadi salah dua faktor penting yang menjadi kontribusi keberhasilan mempertahankan IKN. Kedua hal tersebut dapat dilihat dari persebaran produksi Spitfire di Pertempuran Britania dan kekalahan yang dialami pasukan Niš akibat kekurangan pasukan cadangan di Pertempuran Yugoslavia.

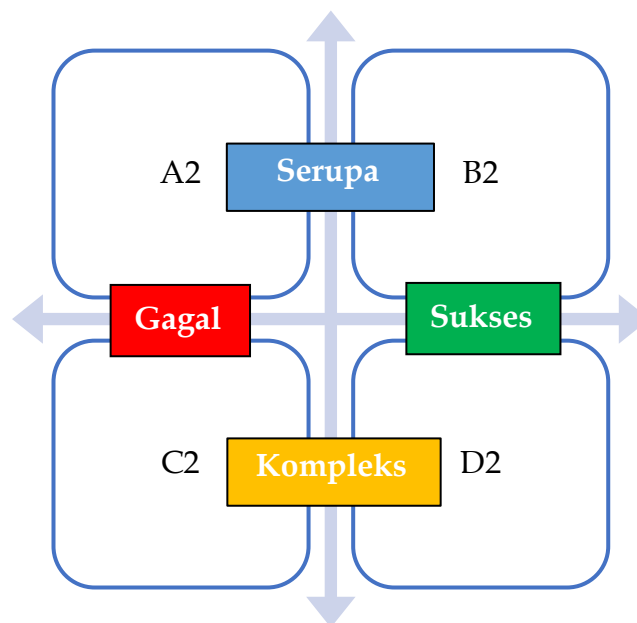
Terkait dengan strategi pertahanan IKN, dapat disimpulkan bahwa fortifikasi akan efektif dengan prakondisi gelar pertahanan yang didukung oleh sistem peringatan dini, sistem komando kendali yang solid, didukung oleh sumber daya perang-baik teknologi senjata maupun manusia- yang tersebar merata. Evakuasi dapat menjadi pilihan strategi pertahanan, apabila dikombinasikan dengan perencanaan yang baik- yakni fortifikasi terbatas untuk menahan musuh dan pemilihan IKN darurat berdasarkan pertimbangan strategis- sehingga memungkinkan *defender* memenangkan perang dalam menghadapi musuh yang kuat. Sebaliknya, faktor idiosinkratik dalam pemilihan IKN darurat terbukti sulit berkontribusi pada kemenangan perang sebagaimana terlihat dari kegagalan loyalis Khadafi di Libya.

Guna menganalisis hasil pertahanan IKN dan medan geografi, laporan ini mengangkat kasus perang Sino-Jepang yang ketiga (1937-1941) dan perang saudara Spanyol (1936-1939). Perang Sino-Jepang ketiga meliputi perpindahan IKN Tiongkok sebanyak dua kali serta penyerangan pada

ketiganya yakni Nanjing yang bertempat di kuadran C2, Wuhan pada kuadran A2, dan Chongqing pada kuadran D2. Sedangkan perang saudara Spanyol mengilustrasikan kuadran B2 dengan penyerangan terhadap Valencia, Barcelona, dan Madrid.

Secara garis besar, perang Sino-Jepang ketiga merupakan agresi Jepang yang bertujuan untuk pengaturan kembali wilayah Tiongkok agar menguntungkan Jepang secara politik dan ekonomi. Perang ini berlangsung sejak 7 Juli 1937 hingga 6 Desember 1941 dengan serangan IKN pertama terhadap Nanjing pada 1 Desember 1937.<sup>67</sup> Pertempuran Nanjing dengan medan geografi yang kompleks, namun gagal dipertahankan. Penyerangan diawali ketika pasukan Jepang menerima perintah dari Tokyo untuk melakukan serangan udara oleh pesawat *bomber* Jepang ke lapangan udara Nanjing sebanyak sembilan kali.<sup>68</sup> Serangan Jepang berperan sebagai diplomasi koersif untuk memaksa Tiongkok duduk di kursi negosiasi. Nanjing bercirikan medan geografi alamiah yang beririsan dengan Sungai Yangtze dan memiliki pegunungan dengan fungsi strategis yakni *Purple Mountain*.<sup>69</sup> Di samping itu, Nanjing juga dikelilingi oleh tembok kota buatan yang menjadi kunci strategi pertahanan fortifikasi IKN.<sup>70</sup>

### Bagan 20. Medan Geografi dan Efektivitas Pertahanan Ibu Kota Negara



<sup>67</sup> Peter Harmsen, *Nanjing 1937 Battle for a Doomed City* (Pennsylvania: Casemate, 2015), hlm. 129.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Dengan dipimpin oleh Komandan pasukan ekspedisi Shanghai Matsui Iwane, penyerangan terhadap Nanjing dilakukan melalui darat dan udara.<sup>71</sup> Di sisi lain, strategi pertahanan Nanjing yang disusun oleh Jenderal Chiang Kaisek berpusat di darat dengan mengandalkan tembok kota beserta fortifikasi tradisional seperti parit, tembok semen, bambu, dan penimbunan karung pasir.<sup>72</sup> Sebagai tambahan, Uni Soviet memainkan peran signifikan dalam pertahanan udara Nanjing dengan cara mencegat sejumlah *bomber* dan menjatuhkan bom udara pada markas pesawat Jepang.<sup>73</sup> Usai evakuasi Jenderal Chiang ke Wuhan pada 7 Desember 1937, pertahanan IKN diserahkan kepada Tang Shengzhi yang mempertahankan gelar fortifikasi hingga akhirnya diperintahkan untuk evakuasi.<sup>74</sup> Nanjing pada akhirnya jatuh ke tangan Jepang pada 13 Desember 1937, setelah hampir seluruh pasukan Tiongkok mengevakuasi diri ke Wuhan.<sup>75</sup>

Pertempuran IKN pada perang Sino-Jepang ketiga berlanjut di Wuhan pada 11 Juni 1938 yang secara *de facto* dinobatkan sebagai IKN darurat.<sup>76</sup> Dengan jarak 541 kilometer dari Nanjing, Wuhan dipilih karena keunggulan strategis medan geografi persungaiannya yang didominasi Sungai Yangtze. Walaupun demikian, pertahanan Wuhan kembali gagal. Karakter wilayah Wuhan mendorong jalur penyerangan dan area pertahanan ke persungai. Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Shinroku Hata mengerahkan serangan amfibi dan penggunaan gas beracun.<sup>77</sup> Terlebih lagi, Jepang juga memberlakukan pengeboman skala besar pada Juli hingga Agustus 1938, di antaranya terhadap markas besar Kuomintang di Wuchang.<sup>78</sup> Di sisi lain, Jenderal Chiang dan Chen Cheng menyusun fortifikasi persungai dengan strategi *protracted war of attrition* yang bertujuan untuk memperlambat serangan Jepang.<sup>79</sup> Langkah ini diberlakukan *Kuo Min Tang* (KMT) agar sempat merelokasi industri pesisir dan pasukannya.<sup>80</sup> Dengan demikian, pertempuran Sino-Jepang berujung pada jatuhnya satu persatu daerah di Wuhan yang berawal dari Madang hingga Canton. Pada akhir September 1938, industri dan pasukan Tiongkok sudah berada di tengah proses evakuasi seiring Jepang mengambil alih

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 141-218.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 216.

<sup>76</sup> Stephen R. MacKinnon, *Wuhan, 1938: War, Refugees, and the Making of Modern China* (London: University of California Press, 2008), hlm. 37.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 31-39.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 122.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>80</sup> *Ibid*.

jalur kereta api strategis Beijing-Hankou.<sup>81</sup> Sebagai akibat dari penguasaan akses strategis tersebut, Jepang berhasil mengepung Wuhan dari arah utara, timur, dan selatan hingga pertahanan IKN Tiongkok kembali kalah terhadap Jepang pada 25 Oktober 1938.<sup>82</sup>

Berdasarkan pertimbangan strategis karakter medan geografi, pertempuran IKN dalam perang Sino-Jepang ketiga beralih ke Chongqing yang berjarak 1.400 kilometer dari Nanjing. Pertempuran Chongqing berlangsung di medan kompleks dengan hasil pertahanan yang sukses. Dengan fortifikasi alamiah yang kuat, IKN darurat ini terletak di semenanjung sempit yang bertemu di antara sungai Jialing dan Yangtze, serta diapit oleh tebing terjal di setiap sisinya.<sup>83</sup> Sebagai tanggapan terhadap langkah strategis Tiongkok, Jepang menyatakan kampanye pengeboman terhadap Chongqing seiring mendeklarasikan tujuan baru yakni membentuk tatanan baru di Asia Timur.<sup>84</sup> Serangan udara Jepang ke ibu kota Chongqing berawal pada Januari 1939 dengan tiga kampanye pengeboman.<sup>85</sup> Eskalasi konflik terus berlanjut hingga September 1941 dengan pengeboman yang semakin intens oleh Jepang, yang puncaknya mencapai 200 *bomber* setiap beberapa jam.<sup>86</sup>

Dalam menghadapi serangan udara Jepang, Chiang Kaishek beserta petinggi KMT lainnya meluncurkan strategi pertahanan yang disebut sebagai *Fangkong* dengan arti “pertahanan udara”.<sup>87</sup> Strategi tersebut memuat kerangka komprehensif institusi, infrastruktur, dan personil yang bertanggung jawab atas seluruh pertahanan sipil dan militer dari serangan udara, juga terbagi menjadi kerangka aktif (*Jiji*) dan pasif (*Xiaoji*).<sup>88</sup> Strategi aktif merupakan upaya menyerang dan menghancurkan pesawat musuh meliputi patroli udara rutin, penyerangan pencegahan (*preemptive*), manuver darat oleh unit artileri anti-pesawat, instalasi baterai anti-pesawat dan penempatan senjata untuk menciptakan garis pertahanan.<sup>89</sup> Sedangkan strategi pasif mengacu pada segala operasi yang bertujuan menjamin keselamatan publik skala besar dari serangan udara berupa aturan, prosedur, dan instruksi edukatif dan informatif.<sup>90</sup> Bersamaan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>83</sup> Edna Tow, “The Great Bombing of Chongqing and the Anti-Japanese War, 1937-1945,” dalam *The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945*, penyunt. Mark Peattie, Edward J. Drea dan Hans van de Ven (California: Stanford University Press, 2011), hlm. 258.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 259.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 260.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 257-262.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 264.

<sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>89</sup> *Ibid*.

<sup>90</sup> *Ibid*.

dengan fortifikasi Chongqing, Jepang mengalihkan perhatian kepada Amerika Serikat dengan penyerangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941.<sup>91</sup> Serangan udara Jepang menurun pesat sehingga Chongqing tidak mengalami satupun pengeboman pada tahun tersebut. Pada tahun 1942, ditemukan hanya sekali penyerangan udara Jepang terhadap Chongqing sebelum perang Sino-Jepang ketiga berakhir.<sup>92</sup> Dengan demikian, hasil pertahanan Chongqing dinilai sukses.

Penelusuran kasus penyerangan IKN dalam perang saudara Spanyol di mana medan geografi Valencia, Barcelona, dan Madrid cenderung serupa dengan pertahanan ketiganya yang gagal. Perang saudara tersebut merupakan konflik antar pemerintahan republikan cenderung kiri dan kelompok pemberontak berisikan gabungan dari junta militer, kelompok nasionalis, monarkis, konservatif, tradisional, dan Falangi.<sup>93</sup> Berlangsung sejak 18 Juli 1936 hingga 31 Maret 1939, pemberontakan ini bertujuan untuk perubahan rezim dan melibatkan serangan terhadap dua IKN darurat yakni Valencia dan Barcelona, serta pengepungan IKN utama Madrid. Awal pemberontakan terhadap pemerintahan republikan Manuel Azaña ditandai dengan deklarasi junta militer, dipimpin oleh Jenderal Emilio Mola dan José Sanjurjo. Pernyataan tersebut diikuti dengan pertempuran dari arah selatan dan barat Spanyol. Seiring meningkatnya ancaman terhadap Madrid, evakuasi Azaña dilakukan berdasarkan pertimbangan idiosinkratik dan IKN Spanyol beralih sejauh 355 kilometer ke Valencia pada 6 November 1936. Dalam menanggapi langkah strategis tersebut, para pemberontak memutus jalur logistik ke IKN darurat Valencia yang berkarakter medan geografi dataran.

Dengan sebagian militer yang berpihak kepada pemberontak, bagian utara Spanyol termasuk Valencia berhasil dikuasai oleh oposisi. Peristiwa ini mendorong relokasi IKN darurat berikutnya ke kota kedua terbesar Spanyol dengan medan persungai yakni Barcelona yang berjarak 626 kilometer dari Madrid. Para pemberontak memiliki keunggulan dalam hal persenjataan -sebagai hasil dari bantuan Jerman dan Italia- dan penguasaan jalur logistik pelabuhan, sehingga memutus rezim Azaña dari bantuan internasional.<sup>94</sup> Kelompok oposisi berhasil mengambil alih Barcelona pada 26 Januari 1939, yang memaksa pemerintah Spanyol mengembalikan IKN ke Madrid yang bermedan geografi dataran. Di

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 265.

<sup>92</sup> *Ibid*.

<sup>93</sup> Helen Graham, *The Spanish Civil War: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2005).

<sup>94</sup> Hugh Thomas, *The Spanish Civil War* (New York: Modern Library, 2001), hlm. 796.

samping serangan pemberontak, politik birokrasi republikan juga mengalami guncangan dengan kudeta militer.<sup>95</sup> Akibatnya, pemerintahan Spanyol beralih dari Azaña kepada Kolonel Segismundo Casado. Berbeda dengan rezim sebelumnya, Casado cenderung mendorong negosiasi damai. Untuk mengayomi tuntutan penyerahan tanpa syarat oleh kelompok pemberontak, pemerintahan Spanyol di bawah Casado tidak lagi melakukan perlawanan dalam perang. Meski demikian, para pemberontak justru mengepung dan menguasai Madrid yang tidak di-fortifikasi pada 31 Maret 1939.<sup>96</sup> Peristiwa tersebut menandakan akhir perang saudara Spanyol dengan seluruh pertempuran IKN-nya.

Berdasarkan penelusuran delapan pertempuran IKN di atas, ditemukan bahwa medan geografi memainkan peran penting dalam memperpanjang durasi pertempuran IKN. Mengacu pada pertempuran IKN dalam perang Sino-Jepang ketiga, penentuan IKN darurat didasari pada medan geografi yang drastis berbeda dengan Wuhan yang bermedan persungai dan Chongqing bermedan pegunungan (tebing) dan persungai. Faktanya, seiring perpindahan IKN tersebut, durasi pertempuran IKN pun semakin berlarut dari yang hanya 13 hari di Nanjing, kemudian menjadi 139 hari di Wuhan, dan pada akhirnya mencapai 203 hari di Chongqing hingga tercapai kemenangan. Hal ini dipengaruhi oleh keunggulan strategis penguasaan medan geografi yang dimiliki oleh *defender* dan sekaligus menuntut penyesuaian strategi penyerangan dari *offender*. Sebagai contoh, penyerangan Jepang di Nanjing yang awalnya didominasi oleh matra darat, harus bergeser kepada penyerangan amfibi di Wuhan, kemudian mengubah fokus kepada serangan udara di Chongqing.

Pada pertempuran pertama di Nanjing, belum efektifnya strategi pertahanan IKN bisa jadi berkorelasi dengan fortifikasi yang belum terdiversifikasi dan dependen pada model tradisional berbentuk tembok. Kesuksesan pemanfaatan medan geografi untuk memperlambat penyerangan pada pertempuran IKN lainnya pun dikonfirmasi dengan kutipan berikut dari tangan kanan Jenderal Chiang Kaisek dalam pertempuran Wuhan, Jenderal Chen Cheng, yakni “...untuk memperpanjang perang dengan menggunakan medan yang menguntungkan, untuk melelahkan dan memaksakan gesekan pada musuh.”

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 809.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 816-819.

Faktor penyumbang efektivitas pertahanan IKN lainnya yang teridentifikasi adalah jalur mobilisasi dan logistik yang berpotensi menjadi *chokepoint* dalam medan pertempuran. Dalam Perang Sino-Jepang ketiga, keberadaan *chokepoint* tersebut vital dalam membuka jalur untuk perpindahan IKN, evakuasi pasukan, serta mobilisasi logistik, serta mendapatkan bantuan luar negeri seperti dari Uni Soviet. Sedangkan Perang Saudara Spanyol memperlihatkan bahwa peran jalur mobilisasi logistik tersebut semakin besar dengan terisolasinya pemerintahan dari bantuan luar negeri dan mobilisasi persenjataan, setelah para pemberontak berhasil menguasai seluruh pelabuhan.

### **Pola Pemindahan Ibu Kota Negara Darurat**

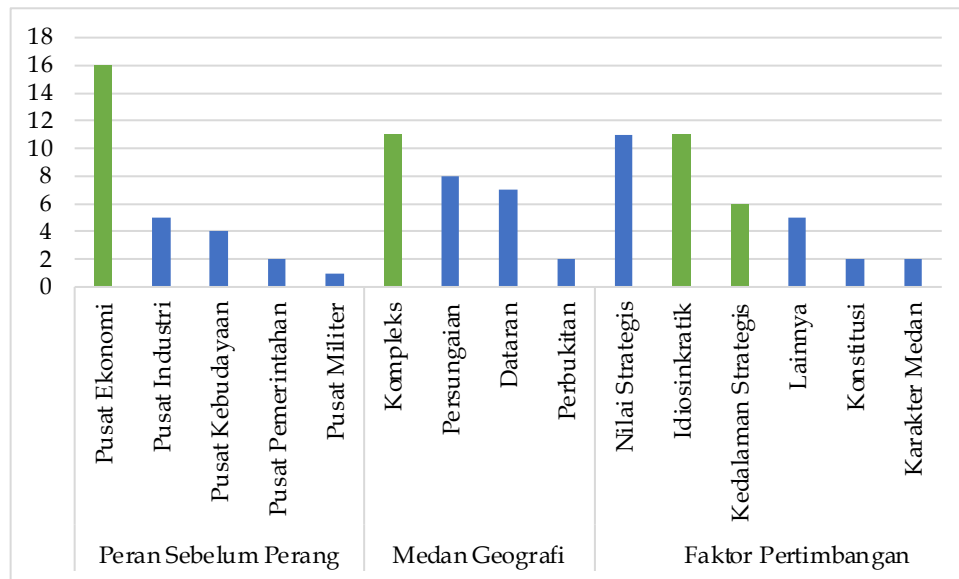
Dalam penelusuran data, serangkaian kasus yang melibatkan IKN darurat yang mencapai 28 kota. IKN darurat merujuk kepada relokasi pusat pemerintahan atau fungsi lainnya yang sebelumnya dipusatkan di IKN, seperti pusat ekonomi dan budaya, karena adanya kontestasi atas kendali IKN utama sebagai akibat dari perang atau konflik bersenjata, baik dalam konflik intranegara maupun antarnegara.

Karakter IKN darurat ditilik dari peran sebelum perang, medan geografi, dan jarak dari IKN lama. Sebelum ditetapkan menjadi IKN darurat, mayoritas kota berperan sebagai pusat ekonomi (16 kasus atau 59%), disusul pusat industri (5 kasus atau 19%), dan pusat kebudayaan (4 kasus atau 15%). Sedangkan sisanya pernah berperan menjadi pusat pemerintahan (2 kasus atau 7%) atau pusat militer (1 kasus atau 4%). IKN darurat didominasi oleh medan geografi kompleks sebanyak 11 kasus atau 41%, disusul persungai (8 kasus atau 30%), dan dataran (7 kasus atau 26%). Sedangkan perbukitan merupakan medan geografi yang paling jarang ditemui pada IKN darurat, yakni 2 atau 7%. Mendasari jarak, rata - rata IKN darurat berjarak 767 kilometer dari IKN utama dengan IKN darurat terdekat berjarak 103 kilometer dan terjauh berjarak 2.707 kilometer.

Faktor pertimbangan pemilihan IKN darurat yang diidentifikasi mencakup nilai strategis, idiosinkratik, kedalaman strategis, konstitusi, karakter medan geografi, dan lainnya. Nilai strategis mencakup pertimbangan yang mendukung *power* untuk kelanjutan perang, seperti kota yang merupakan pusat ekonomi, industri, dan/ atau pusat militer. Faktor idiosinkratik mengacu pada pertimbangan personal, terutama VIP/pemimpin, yang tidak selalu dipahami sebagai pilihan rasional misalnya kota kelahiran

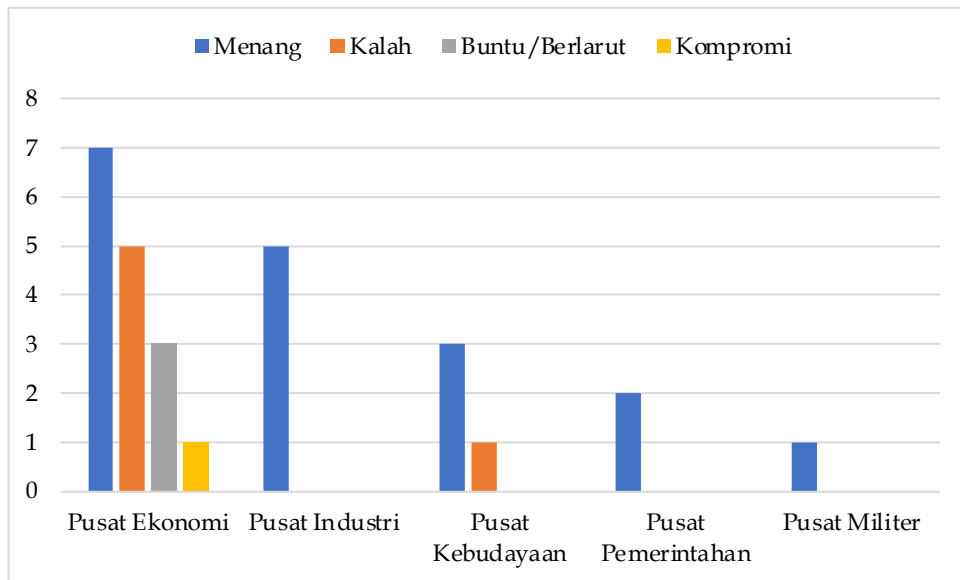
pemimpin politik. Kedalaman strategis diukur sebagai jarak antara IKN darurat dari IKN lama. Konstitusi berarti penetapan IKN darurat dilakukan/ditetapkan dengan pertimbangan hukum/regulasi. Karakter medan mengacu pada pemilihan berdasarkan medan geografi tertentu, yang berbeda dari IKN sebelumnya dan ditengarai memberi keuntungan strategis bagi kekuatan militer pihak defender.

**Bagan 21. Pola Ibu Kota Negara Darurat**



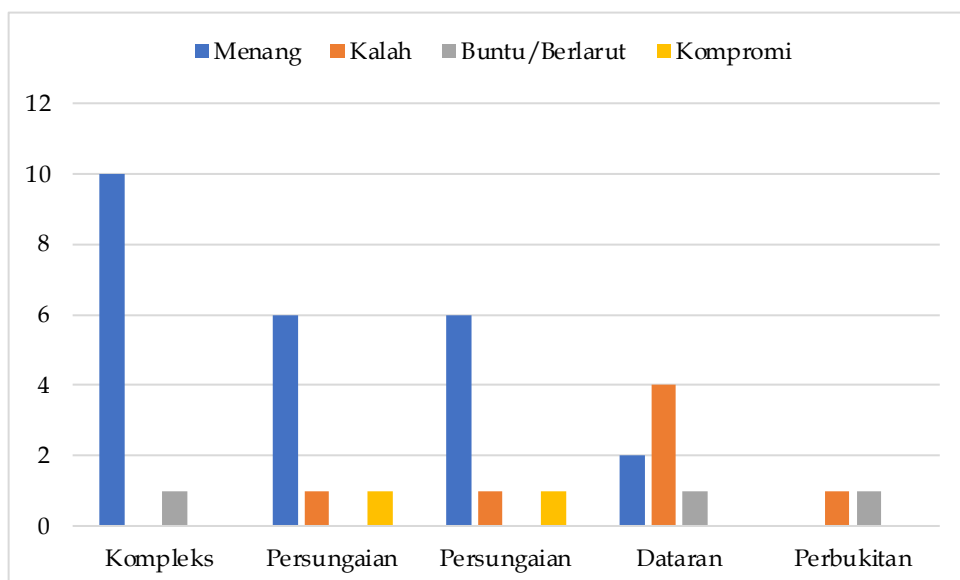
Analisis silang antara kepemilikan IKN darurat dengan hasil akhir perang menemukan hasil yang menarik: negara yang memiliki IKN darurat lebih banyak memenangkan perang, yakni sebanyak 18 kasus atau 67%. Sebaliknya, hanya 6 kasus atau 22% negara yang menetapkan IKN darurat berakhir sebagai pihak yang kalah perang. Sisanya sebanyak 3 kasus atau 11% pihak *defender* harus menghadapi perang berlarut/buntu dan 1 kasus atau 4% berakhir dengan kompromi. Berdasarkan persilangan peran IKN darurat dengan hasil akhir perang pada Bagan 22, ditemukan bahwa IKN darurat dengan peran sebagai pusat ekonomi adalah yang paling banyak muncul sebagai pemenang perang (7 kejadian), disusul oleh pusat industri (5 kasus), dan pusat kebudayaan dengan 3 kasus. Lebih jauh lagi, IKN darurat dengan peran pusat industri, pusat pemerintahan, atau pusat militer selalu muncul sebagai pemenang perang.

**Bagan 22. Peran Ibu Kota Negara Darurat dan Hasil Akhir Perang**



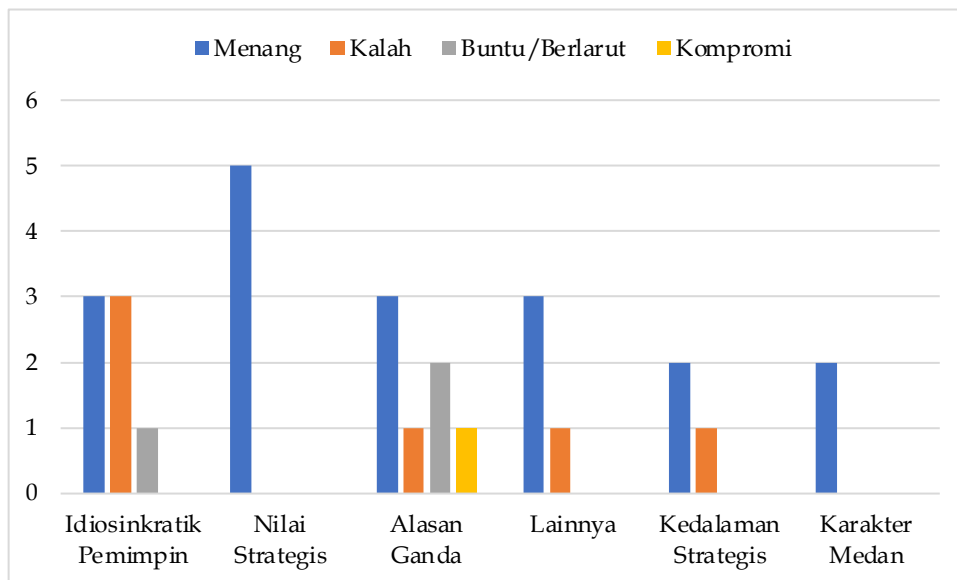
Mengacu kepada persilangan antara medan IKN darurat dan hasil akhir perang pada Bagan 23, ditemukan bahwa medan geografi kompleks paling banyak muncul sebagai pemenang perang dengan 10 kali, disusul persungai dengan 6 kali, dan dataran dengan 2 kali. Perbukitan adalah satu-satunya medan yang tidak menghasilkan *defender* pemenang perang dan medan daratan justru menghasilkan lebih banyak *defender* yang kalah perang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua medan ini lebih menguntungkan pihak *offender*.

**Bagan 23. Karakter Medan Ibu Kota Negara Darurat dan Hasil Akhir Perang**



Berdasarkan Bagan 24, dapat dilihat bahwa kalibrasi antara pertimbangan pemilihan IKN darurat dengan hasil akhir perang ditemukan bahwa pertimbangan bernilai strategis dan karakter medan selalu mendukung pihak bertahan untuk keluar menjadi pemenang perang. Sedangkan faktor idiosinkratik tidak menghasilkan keuntungan signifikan bagi pihak bertahan, dengan hasil kemenangan dan kekalahan perang yang berimbang 3:3 dan sekali buntu/berlarut.

**Bagan 24. Pertimbangan Pemilihan Ibu Kota Negara Darurat dan Hasil Akhir Perang**



### Perencanaan Pertahanan Ibu Kota Nusantara

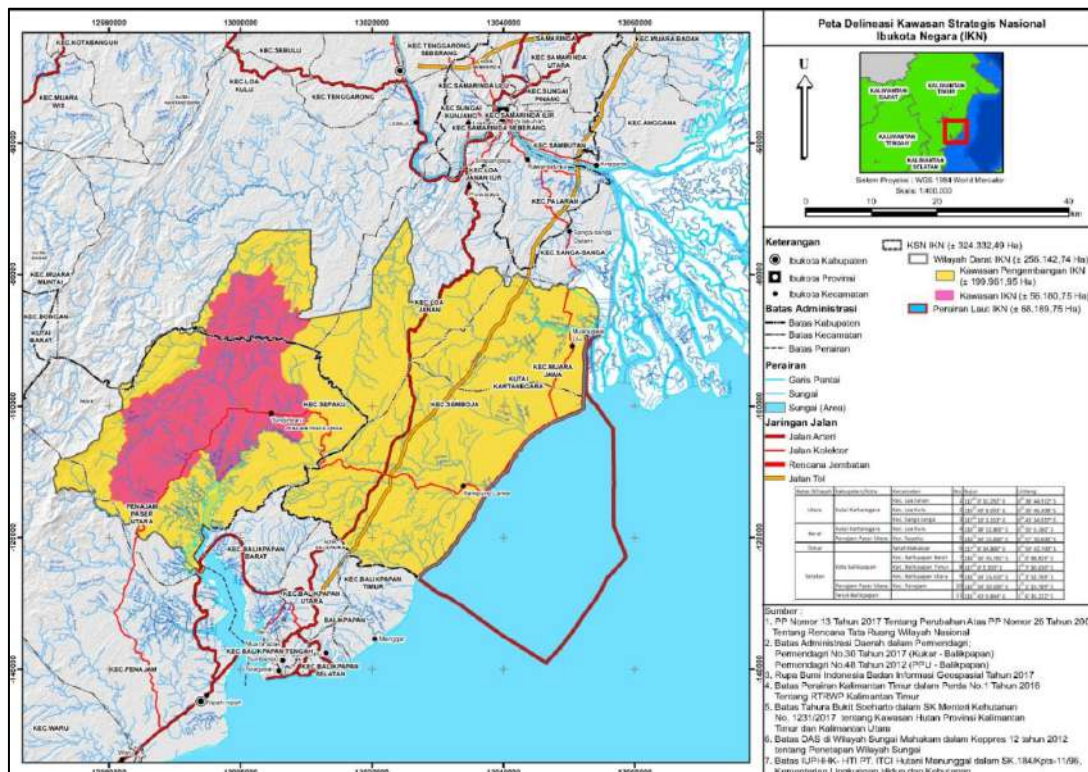
Rencana pemindahan IKN Indonesia telah digagas oleh empat pemerintahan berbeda, yakni Sukarno, Suharto, Yudhoyono, dan Joko Widodo. Pada 2019, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi IKN baru dengan nama “Nusantara”.<sup>97</sup> Wilayah Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare.<sup>98</sup> Secara spesifik, studi ini

<sup>97</sup> Meski sempat terhambat pandemi COVID-19, Rencana Induk IKN selesai di penghujung 2020 yang diikuti dengan pengesahan Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara pada bulan Januari 2022. Implementasi dimulai dengan penerbitan lima regulasi turunan, yaitu satu Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden, dan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, serta Tim Transisi IKN.

<sup>98</sup> Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni (i) Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas kurang lebih 56.180 hektare; (ii) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671

memuat dua penilaian terkait perencanaan pertahanan Nusantara. Pertama, menaksir perubahan karakter ancaman berdasarkan geografi militer. Kedua, mengidentifikasi jurang antara peraturan perundang-undangan yang ada dan kebutuhan strategi pertahanan IKN—terutama dalam keadaan bahaya/perang.

**Gambar 2. Peta Ibu Kota Nusantara**



Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

### *Perubahan Karakter Ancaman dan Geografi Militer IKN*

Penetapan Nusantara sebagai IKN baru memunculkan tantangan dalam perencanaan strategi pertahanan. Pertama, Nusantara memiliki karakteristik geografi militer dengan faktor-faktor fisik – seperti relasi spasial, bentang wilayah darat, serta karakteristik perairan pesisir dan laut, yang berbeda dengan Jakarta. Kedua, sebagai konsekuensi perubahan geografi militer, tipe ancaman yang memungkinkan kombinasi bentuk serangan dan sasaran terhadap IKN juga berubah dan bahkan berlipat ganda. Pada akhirnya, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi kesesuaian

hektare; dan (iii) Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) yang memiliki luas wilayah 199.962 hektare. Lampiran Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, hlm. 9.

antara strategi pertahanan negara dan gelar kekuatan yang sedang berjalan dengan kebutuhan perlindungan IKN baru.

Perubahan geografi militer mencakup jarak perbatasan darat dan pelabuhan laut, serta medan geografi. Walaupun tidak terdapat jarak ke perbatasan darat, Jakarta memiliki pelabuhan yang berjarak 17 kilometer dari pusat kota dan berada dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Selat Sunda. Medan geografi Jakarta adalah daerah perkotaan dengan kontur yang relatif datar dengan banyak kanal kecil. Mungkin satu-satunya kesamaan antara Jakarta dengan Nusantara adalah ketiadaan sungai strategis. Sementara itu, geografi militer Nusantara jauh berbeda yang dicirikan dengan: (i) keberadaan empat perbatasan darat ke Malaysia yang berjarak paling dekat 384 kilometer (Pos Lintas Batas Long Nawang) dan paling jauh 589 kilometer (Pos Lintas Batas Sei Nyamuk/Sebatik); (ii) akses ke pelabuhan yang terdekat di Pelabuhan Semayang Balikpapan berjarak 96 kilometer; (iii) lokasi di pesisir Teluk Balikpapan menyebabkan medan geografinya kompleks dengan kombinasi hutan bakau dan kontur tanah berbukit dengan ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut (mdpl) di sisi utara<sup>99</sup>; dan (iv) karakteristik perairan pesisir dan laut Nusantara yang terletak persis di ALKI II dan *choke point* di Selat Makassar.

Baik Jakarta maupun Nusantara menghadapi jenis ancaman dari dalam (intranegara) dan luar negeri (antarnegara). Menurut sumber Bappenas,<sup>100</sup> Indonesia masih menghadapi potensi ancaman agresi dengan kemungkinan bentuk serangan melibatkan tiga matra. Pada matra darat, ancaman datang dari negara dengan kemampuan aset intai sekaligus tempur, kemampuan kimia, biologi, radiologi dan nuklir, serta serangan dengan gelar dan sasaran terbatas. Pada matra laut, ancaman datang dari negara dengan kemampuan aset intai, operasi amfibi, pertempuran permukaan, pertempuran kapal selam, misil jelajah berbasis permukaan laut dan kendaraan bawah laut nirawak (*undersea unmanned vehicle*) yang melintasi ALKI I dan II. Pada matra udara, negara dengan kemampuan aset intai, pesawat pembom, rudal jelajah berbasis udara dan hipersonik, dan pesawat tempur nirawak (*unmanned combat aerial vehicle*) berpotensi menjadi sumber ancaman. Sedangkan dari dalam negeri terdapat ancaman sabotase/teror dan perang saudara.

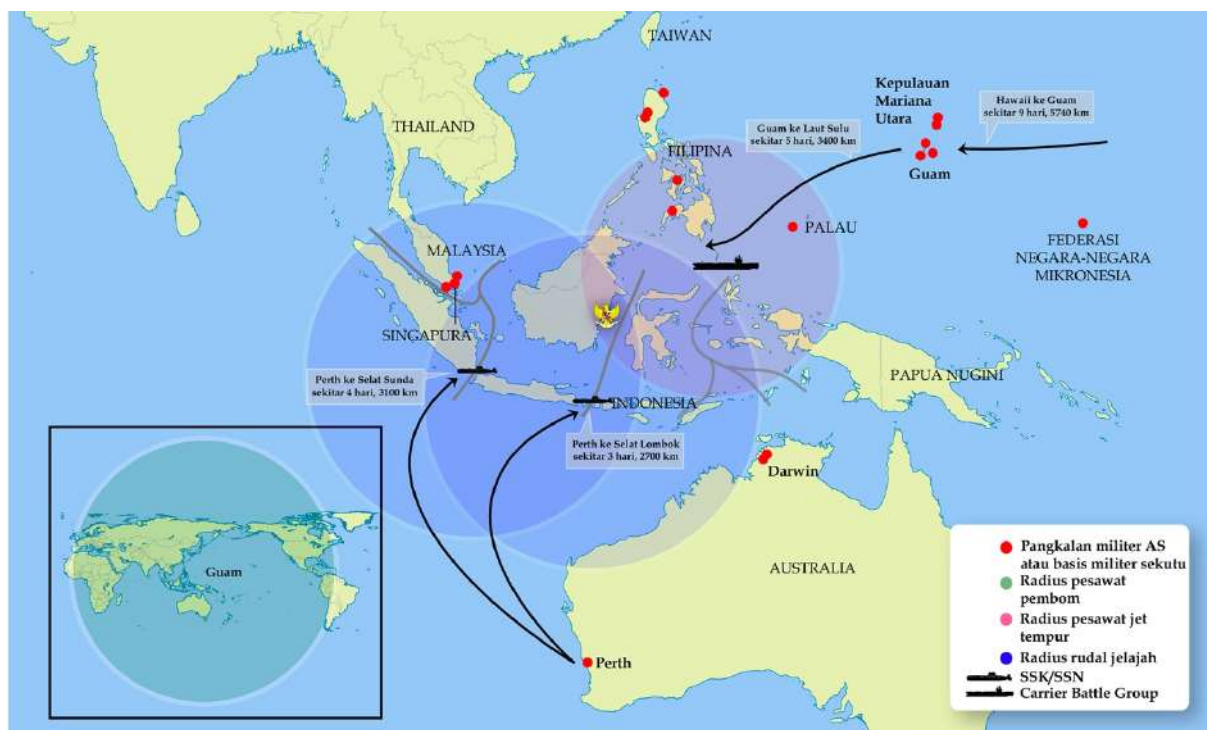
---

<sup>99</sup> Lampiran Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

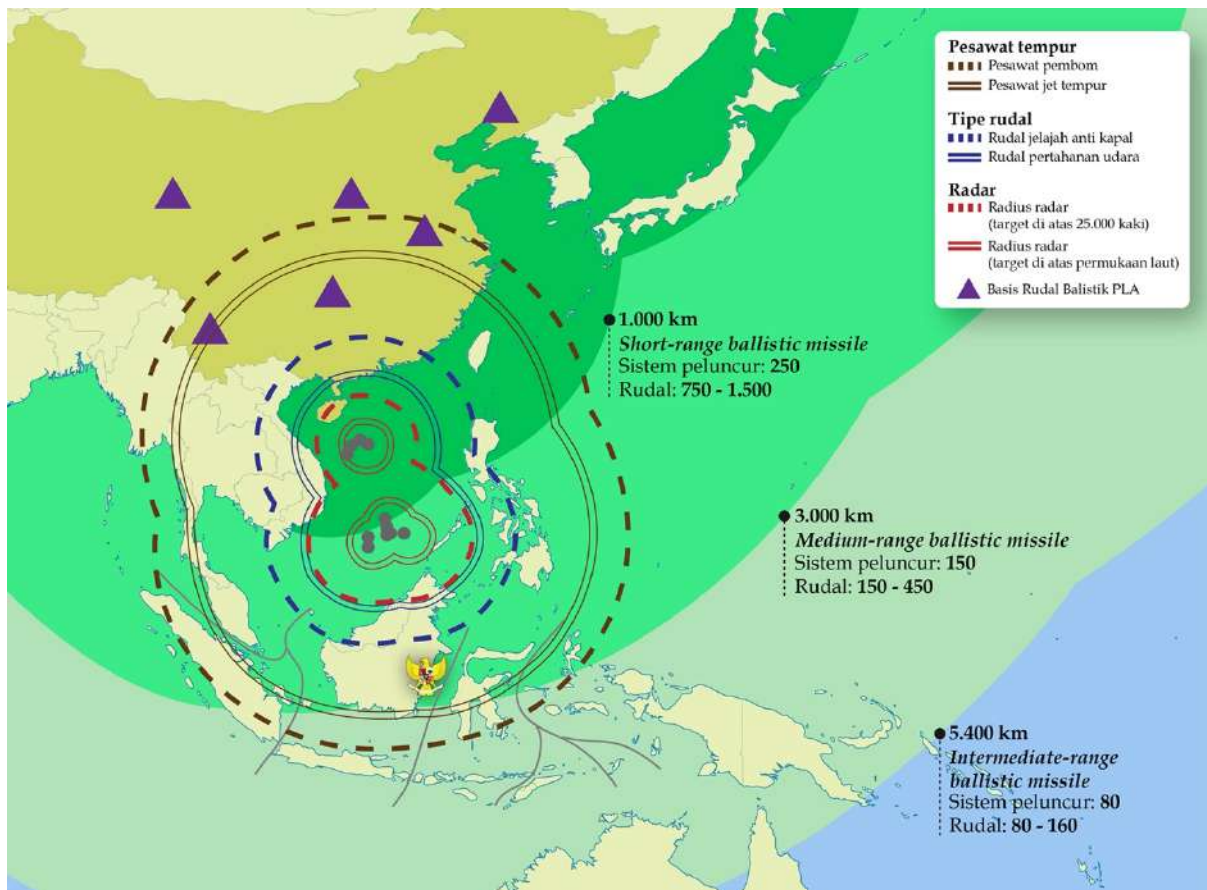
<sup>100</sup> Hasil wawancara dan paparan dari Deputi Polhukam Bappenas dengan beberapa pengembangan dari penulis pada jenis ancaman di Jakarta dan jenis serangan, dikutip dari Program Studi Strategi Perang Semesta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN)* (Sentul: Universitas Pertahanan, 2022), hlm. 76.

Gelar kekuatan militer negara-negara adidaya di Indo-Pasifik juga mesti dipertimbangkan sebagai potensi ancaman terhadap Indonesia secara umum dan Nusantara secara khusus. Wilayah udara Nusantara masuk dalam radius tiga kapabilitas militer AS: pesawat pembom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah. Di sisi lain, wilayah Nusantara juga masuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pembom Tiongkok. Pangkalan militer AS yang tersebar dari Samudra Pasifik hingga Australia juga berpotensi menjadi ancaman, apabila AS menggunakannya sebagai pangkalan aju untuk proyeksi kekuatan ke Selat Taiwan melalui wilayah Indonesia. Serangan serupa dapat dilakukan pula oleh Tiongkok dari arah barat laut. Wilayah maritim Indonesia juga menjadi jalur pelayaran kapal selam, baik konvensional maupun nuklir. Terlebih lagi dengan rencana penempatan (*docking*) kapal selam AS dan Inggris di Australia di dalam kerangka kerja sama AUKUS.

**Gambar 3. Gelar Kekuatan Militer Amerika Serikat**



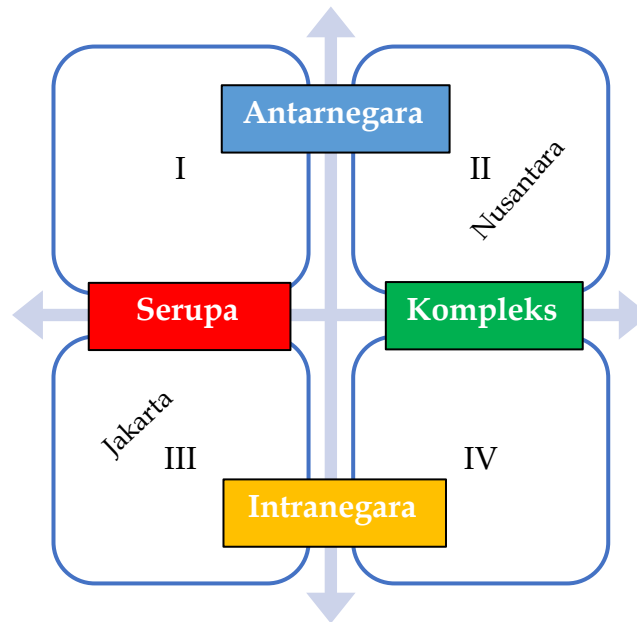
**Gambar 4. Gelar Kekuatan Militer Tiongkok**



Perbedaan ancaman antara kedua IKN dipengaruhi oleh faktor demografi dan geografi perbatasan. Di Jakarta, terdapat tambahan ancaman dari dalam negeri, yaitu pemberontakan yang disebabkan oleh besaran populasi dan ragam demografi, serta sejarah pemberontakan yang pernah terjadi baik di Jakarta maupun di Pulau Jawa. Sedangkan di Nusantara, terdapat tambahan ancaman antarnegara yaitu pelanggaran wilayah, yang bisa berkembang menjadi serangan terhadap IKN. Sementara itu, pada jenis ancaman transnasional dari sumber luar negeri, kejahatan berbagai jenis akan menjadi dominan dibandingkan Jakarta karena posisi Nusantara yang berdekatan dengan Sulu, Sabah dan Poso—yang dikenal sebagai daerah operasi/transit kelompok teroris.

Menimbang perbedaan karakter geografi militer dan jenis ancaman mereka, kedua IKN dapat digolongkan ke dalam kuadran yang berbeda dalam matriks skenario pertahanan ibu kota negara. Jakarta memiliki kecenderungan jenis ancaman intranegara dan geografi militer yang tidak kompleks (kuadran III). Sementara itu, Nusantara cenderung rawan dari ancaman konflik antarnegara dan memiliki geografi yang kompleks (kuadran II).

**Bagan 25. Skenario Pertahanan Ibu Kota Negara**



*Operasionalisasi Penanggulangan Bahaya dan Penetapan Ibu Kota Negara Darurat*

Salah satu pelajaran terpenting dalam pola pertahanan IKN di masa lalu adalah tidak hanya mengandalkan fortifikasi, tetapi juga rencana evakuasi dan penetapan IKN darurat. Dalam sejarah Indonesia, konsep IKN darurat bukan hal baru. Preseden penetapan dan pemindahan IKN darurat terjadi pada saat Agresi Militer Belanda II.<sup>101</sup> Pada tanggal 19 Desember 1948, musuh menyerbu ibu kota Yogyakarta dengan menguasai lapangan terbang Maguwo dan menerjunkan pasukan di pusat kota. Sasaran penyerangan tersebut ada dua, yakni menghancurkan pusat kekuatan TNI serta menawan pimpinan pemerintahan TNI.<sup>102</sup> Pertempuran hanya berlangsung 45 menit karena TNI minim senjata berat dan meriam udara.

Meski Panglima Besar Sudirman telah memberi himbauan evakuasi, pemerintah tetap tinggal di Yogyakarta untuk memudahkan komunikasi dengan Komisi Tiga Negara guna mendesak Belanda kembali ke meja

<sup>101</sup> Pemindahan IKN di Indonesia sebenarnya terjadi dua kali, yakni dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946 dan dari Yogyakarta ke Bukittinggi. Meski pemindahan yang pertama tidak diatur dalam UUD 1945 yang asli, namun menjadi suatu praktik ketatanegaraan yang diputuskan oleh Kepala Negara dan didukung oleh kabinet dan parlemen atas pertimbangan strategis untuk mempertahankan kemerdekaan. D. Nicky Fahrizal, "Kerangka Hukum Evakuasi IKN dan Penetapan Wartime Capital", presentasi pada FGD Pertahanan IKN yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti Universitas Bina Nusantara dan LAB 45 pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>102</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid I 1945-1949* (Jakarta: Markas Besar TNI, 2000), hlm. 174.

perundingan.<sup>103</sup> Sebagai bagian dari upaya mitigasi kemungkinan serangan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukittinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat apabila pimpinan negara di Yogyakarta tidak bisa lagi melakukan fungsi pemerintahan. Pertimbangan pemilihan Bukittinggi cukup strategis. Pertama, Bukittinggi merupakan ibu kota dari pemerintahan Sumatera, yang mewarisi sistem Belanda di mana Sumatera menjadi satu wilayah provinsi yang terdiri dari sepuluh keresidenan<sup>104</sup>. Kedua, Bukittinggi juga direkomendasikan karena wilayah yang luas dan dukungan rakyat untuk sokongan logistik kepada pasukan yang bergerilya<sup>105</sup>. Apabila kemudian pemerintahan darurat tersebut gagal, rencana berikutnya adalah membentuk pemerintahan pelarian di India.

Penetapan IKN darurat merupakan alternatif dari strategi fortifikasi. Sebulan sebelum Agresi Militer Belanda II, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan Perintah Siasat No. 1 pada bulan November 1948. Perintah tersebut terdiri atas dua keputusan utama, yaitu: pertama, inisiasi “perang rakyat semesta” dalam menghadapi gempuran Belanda; kedua, pemberlakuan sistem *wehrkreise* atau lingkaran pertahanan otonom yang didukung seluruh sumber daya setempat. Selain itu, pasukan-pasukan TNI yang tengah hijrah dan berada di wilayah lain diminta melakukan *wingate* atau menyusup kembali ke daerah asalnya dan mendirikan kantong-kantong perlawanan.

Selain itu, Dewan Siasat Militer sebelumnya mempertimbangkan Sumatera sebagai pusat perjuangan karena luasnya ruang gerak di wilayah tersebut. Namun, jumlah penduduk yang sedikit menjadikannya kurang ideal bagi mobilisasi pasukan dan dukungan logistik dalam perang rakyat semesta. Akhirnya, Sumatera diputuskan menjadi basis perjuangan berikutnya apabila perlawanan di Jawa tidak bisa dilanjutkan. Sumatera juga disiapkan menjadi tempat pengungsian bagi pimpinan negara, yaitu di Aceh. Namun, usulan ini ditolak oleh pimpinan negara dengan alasan psikologis rakyat di Jawa yang sudah terbiasa dekat dengan pimpinannya. Sumatera kemudian dijadikan basis penguatan Angkatan Laut Republik Indonesia karena

---

<sup>103</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, hlm. 176-177. Sore harinya, Yogyakarta sudah jatuh ke tangan Belanda. Adapun Pangsar Sudirman serta KSAP Kolonel TB Simatupang sudah meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin peran gerilya. Presiden Soekarno serta beberapa anggota kabinet dijadikan tawanan Belanda dan kemudian diasingkan ke Bangka.

<sup>104</sup> Meri Destel, “Mengapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi (Sumatera Barat)”. *Jurnal Edukasi* 1, No. 1 (2021), hlm. 41.

<sup>105</sup> *Ibid.*

dianggap paling aman dari kemungkinan serangan Belanda dan lebih mudah untuk melakukan penyelundupan persenjataan.

Perkembangan lain tentang pengaturan ibu kota negara darurat juga terjadi pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950 mengatur secara eksplisit mengenai pemindahan ibu kota apabila negara dalam keadaan bahaya. Pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali dalam hal darurat dapat menentukan tempat lain. Pasal 68 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapatnya di Jakarta dan dalam hal darurat, pemerintah menentukan tempat yang lain. Pasal 96 memungkinkan pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab menetapkan undang-undang darurat, dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 97. Pada Pasal 128, Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh DPR.

Berkaca dari ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang cepat dan keputusan tetap menjadi keputusan politik yang dijamin konstitusi dalam keadaan darurat. Untuk menjamin keselamatan bangsa, presiden juga diamanatkan untuk memindahkan kedudukan pemerintah beserta tempat rapat dari DPR. Ini memudahkan pemerintah untuk membuat undang-undang darurat yang memerlukan keputusan dari sidang DPR. Sehingga baik dalam keadaan darurat dan dipindahkan tempat IKN, lembaga eksekutif maupun legislatif dapat menjalankan fungsinya. Dengan pasal-pasal yang ada di dalam UUDS 1950, pemerintah diberi amanat untuk memindahkan IKN tanpa diberi kewenangan yang terlalu besar dari diberlakukannya berbagai situasi darurat dari keadaan bahaya hingga darurat militer. Namun, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil Amandemen I-IV tidak lagi memuat ketentuan seperti di atas. Hal ini berpotensi menjadi sumber permasalahan konstitusional jika dalam keadaan perang atau darurat lainnya presiden harus memindahkan IKN.

Dalam rangka mengatur pemindahan IKN ke Nusantara, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang relevan untuk aspek pertahanan.<sup>106</sup> Merujuk pada Perpres No. 63/2022, elemen pertahanan dan keamanan dimuat dalam Lampiran Bab III, Bab IV, dan Bab VI. Prinsip dasar dan

---

<sup>106</sup> Secara keseluruhan pemerintah telah menerbitkan enam produk peraturan perundang-undangan untuk pemindahan IKN. Namun, tidak setiap peraturan pendukung membahas mengenai elemen pertahanan. Perpres yang membahas mengenai penyelenggaraan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan secara khusus dijabarkan dalam lampiran.

strategi pertahanan dan keamanan di IKN dijelaskan pada lampiran Bab III Sub Bab 3.9 yang kemudian terbagi ke dalam tujuh bagian.

**Tabel 4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemindahan Ibu Kota Indonesia**

Peraturan	Ketentuan	Subyek
UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara	Pasal 20	Penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan di IKN
Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara	Lampiran Bab III Sub Bab 3.9	Prinsip Dasar dan Strategi Pertahanan dan Keamanan IKN
	Lampiran Bab IV Sub Bab 4.1.1.3	Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Pendukung
	Lampiran Bab VI Sub Bab 6	Tahapan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan di Tahap I-V
Perpres No. 64 /2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042	Pasal 83 ayat (1)	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	Pasal 83 ayat (2)	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	Pasal 90 ayat (1)	Zona Perairan yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan
	Pasal 90 ayat (2)	Zona Perairan yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan

Jika disimpulkan, lokasi IKN Nusantara yang dinilai strategis, baik dari matra darat, laut, maupun udara, dan posisinya sebagai CoG baru, menuntut penetapan sistem pertahanan dan keamanan berlapis modern, penyelenggaraan pembangunan postur pertahanan negara dan pembangunan kelembagaan. Pembangunan ini akan disinergikan dengan sistem dan strategi keamanan cerdas (*smart defence*), sistem dan strategi keamanan siber, dan dukungan intelijen negara. Selain itu, rencana penempatan infrastruktur pertahanan dan keamanan juga dipaparkan pada Lampiran Bab IV Sub Bab 4.1.1.3 Bagian G, yang meliputi satuan-satuan TNI dan satuan kepolisian. Pada Lampiran Bab VI Sub Bab 6, dijelaskan mengenai rencana pembangunan simbol dan sistem

pertahanan dan keamanan, dan pemindahan personil bidang pertahanan dan keamanan dari Tahap I (2022-2024) hingga Tahap V (2040-2045). Di sisi lain, kawasan pertahanan dan keamanan dibagi dalam Perpres No. 64 Tahun 2022 Pasal 83 ayat (1) dan 83 ayat (2). Kemudian, pembagian zona perairan yang merupakan zona pertahanan dan keamanan dijelaskan dalam Pasal 90 ayat (1) dan 90 ayat (2).

Secara umum, terdapat diskrepansi dalam aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah dalam keadaan darurat, termasuk dalam hal evakuasi dan penetapan IKN darurat. Apabila ditelaah lebih lanjut, regulasi terkait IKN lebih menitikberatkan pada proses perencanaan pemindahan dan pembangunan IKN. Akan tetapi regulasi yang ada belum mengatur kewenangan pemerintah dalam keadaan darurat atau perang untuk mitigasi atau respons serangan terhadap IKN melalui fortifikasi dan/atau evakuasi.

Indonesia hanya memiliki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 23/1959, yang merupakan turunan dari Pasal 12 UUD 1945 mengenai penetapan keadaan bahaya. Perppu tersebut mengatur tentang penetapan keadaan bahaya, yaitu darurat sipil, darurat militer hingga keadaan perang. Untuk menghindari permasalahan konstitusional ketika terjadi penyerangan ke IKN, pemerintah dan parlemen perlu melakukan amendemen kepada Pasal 12 UUD 1945 dengan menambahkan landasan pemindahan IKN dan penetapan IKN darurat. Selanjutnya, perlu dilakukan perubahan terhadap Perppu No. 23/1959 dengan menyesuaikan dengan kebutuhan strategis di masa ini.

### **Saran Kebijakan Pertahanan Ibu Kota Nusantara**

Perubahan geografi militer dan karakter ancaman meniscayakan adanya paradigma baru atau pergeseran strategi dari pertahanan mendalam ke arah strategi antiakses/penangkalan (*anti-access/area denial*).<sup>107</sup> Setidaknya ada tiga pertimbangan yang mendasari kebutuhan tersebut. Pertama, dekonsentrasi CoG karena Nusantara hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pusat ekonomi tetap berada di Jakarta. Kedua, kerawanan IKN dari ancaman udara yang mampu menaklukkan tirani kedalaman strategis dengan cepat. Ketiga, pertahanan IKN

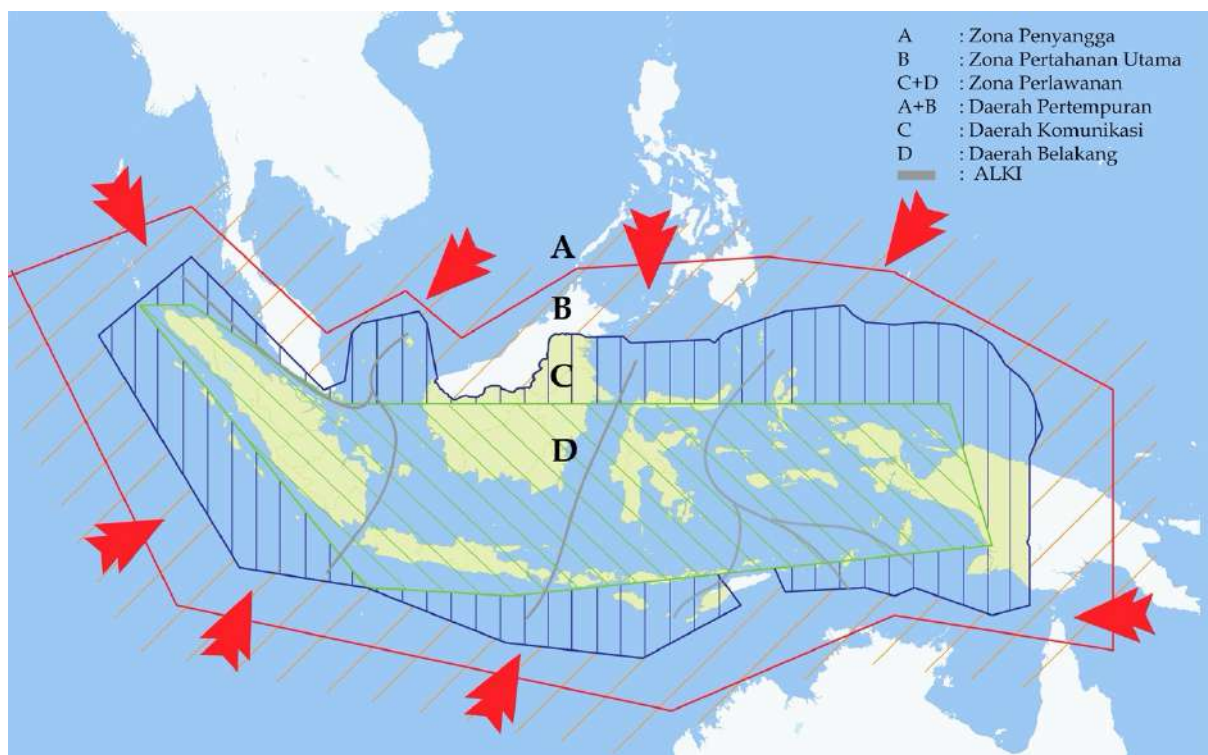
---

<sup>107</sup> Mutia Yuantisya, "IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Panglima TNI: Kita Memang Masih Kurang," *Tempo*, <https://nasional.tempo.co/read/1594386/ikn-rentan-ancaman-serangan-udara-panglima-tni-kita-memang-masih-kurang/full&view=ok> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022).

sesungguhnya membutuhkan strategi komprehensif yang tidak boleh terpisahkan dari strategi pertahanan negara yang bercirikan perang semesta, defensif aktif, dan pertahanan berlapis.

Pertahanan berlapis mensyaratkan terbentuknya tiga zona pertahanan, yaitu zona penyangga yang memerlukan kemampuan serangan pendahuluan, zona pertahanan yang memerlukan kemampuan serangan balas (*countre offensive*), dan zona perlawanan sebagai daerah perang berlarut atau gerilya. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2021 menambahkan konsep “pertahanan pulau-pulau besar” sebagai bentuk pertahanan mendalam, yang mensyaratkan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman secara mandiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut. Pendekatan strategi itu tentunya memerlukan dukungan logistik antar pulau, baik melalui udara dan laut, dan komando pengendalian wilayah.

**Gambar 5. Strategi Pertahanan Laut Nusantara**



Kajian telah dilakukan untuk mengidentifikasi aspek pertahanan IKN, perubahan ancaman militer dan bersenjata, dan kebutuhan pembentukan satuan dan pemindahan/relokasi satuan. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 adalah yang pertama kali secara eksplisit menyebut upaya penataan dan pengelolaan sistem pertahanan militer terpadu di

Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun, hingga kajian ini disusun, belum ada desain resmi fortifikasi maupun peta jalan pertahanan di Kalimantan.

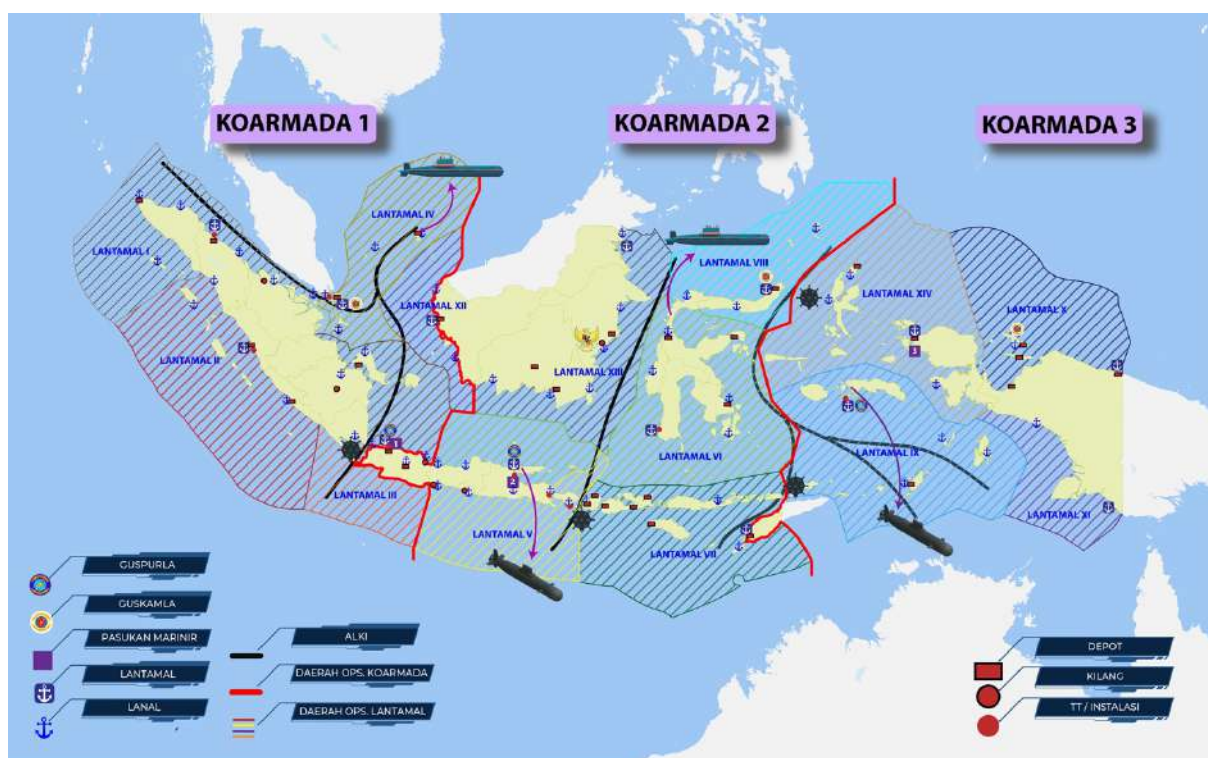
Agenda pertahanan IKN yang ada saat ini terdiri atas: (i) rencana kepindahan 60 ribu aparatur sipil negara, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (ii) TNI Angkatan Darat (AD) berencana membentuk Komando Daerah Militer khusus IKN dan satuan pendukung yang dilengkapi antara lain unit produksi, depo cadangan, unit penangkal senjata pemusnah masal, satuan kesehatan, bunker multifungsi, dan satelit militer; (iii) TNI Angkatan Laut (AL) berencana membentuk Pasukan Marinir 4 dengan personel dari Batalion Infanteri 8/Marinir dan Batalion Infanteri 10/Marinir; (iv) TNI Angkatan Udara (AU) telah merencanakan pembangunan pangkalan udara baru di wilayah IKN, menggeser Skuadron 17 dan Skuadron 45 ke Kalimantan Timur untuk menunjang mobilitas strategis kepala negara. Selain relokasi dan pembentukan satuan baru, ada pula rencana peningkatan status pangkalan udara dan laut, serta realokasi dan pelengkapan alutsista TNI.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara meliputi strategi penangkalan, strategi pertahanan berlapis, dan strategi pengendalian laut. Namun, perkembangan teknologi militer dan bentuk ancaman baru dalam peperangan modern seperti rudal jelajah atau hipersonik, pesawat tempur generasi lima dan kendaraan militer tanpa awak, meniscayakan adanya penyesuaian kebijakan pertahanan Indonesia. Karakteristik Ibu Kota Nusantara yang berada di ALKI II dan *choke point* di Selat Makassar, serta posisinya yang berada tidak jauh dari pesisir pantai yang bisa dipergunakan sebagai lokasi pendaratan musuh, pun membutuhkan pendekatan keamanan dan strategi pertahanan yang lebih spesifik.

Pembentukan tiga Komando Armada (Koarmada) TNI AL yang berlokasi di Tanjungpinang, Surabaya, dan Sorong sejak 2018 merupakan upaya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan di seluruh wilayah laut Indonesia. Gelar TNI AL untuk pertahanan IKN dapat dilakukan dengan peningkatan status Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) mengingat lokasi IKN Nusantara yang berada di pesisir Teluk Balikpapan. Peningkatan status Lanal Balikpapan atau perubahan organisasi Lantamal menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) bersama pembentukan Kodamar di Samboja yang telah dimuat dalam Perpres No. 63/2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan juga telah beberapa kali diwacanakan menjadi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pesisir dan laut sekitar Ibu Kota Nusantara.

Invasi Jepang terhadap Hindia Belanda saat Perang Pasifik (Desember 1941-April 1942) menunjukkan kemungkinan pemanfaatan ALKI II dan III untuk menduduki wilayah dan menguasai infrastruktur strategis Indonesia. Preseden tersebut meniscayakan TNI AL menggelar kapabilitas antiakses dan penangkalan laut di sekitar Ibu Kota Nusantara. Oleh sebab itu, rencana strategis penguatan armada kapal selam dan pembangunan pangkalannya di Natuna dan Teluk Palu menjadi krusial bersama dengan sistem persenjataan lainnya seperti rudal antikapal dan sistem penginderaan maritim jarak jauh.

**Gambar 6. Gelar Kemampuan Komando Armada Republik Indonesia**

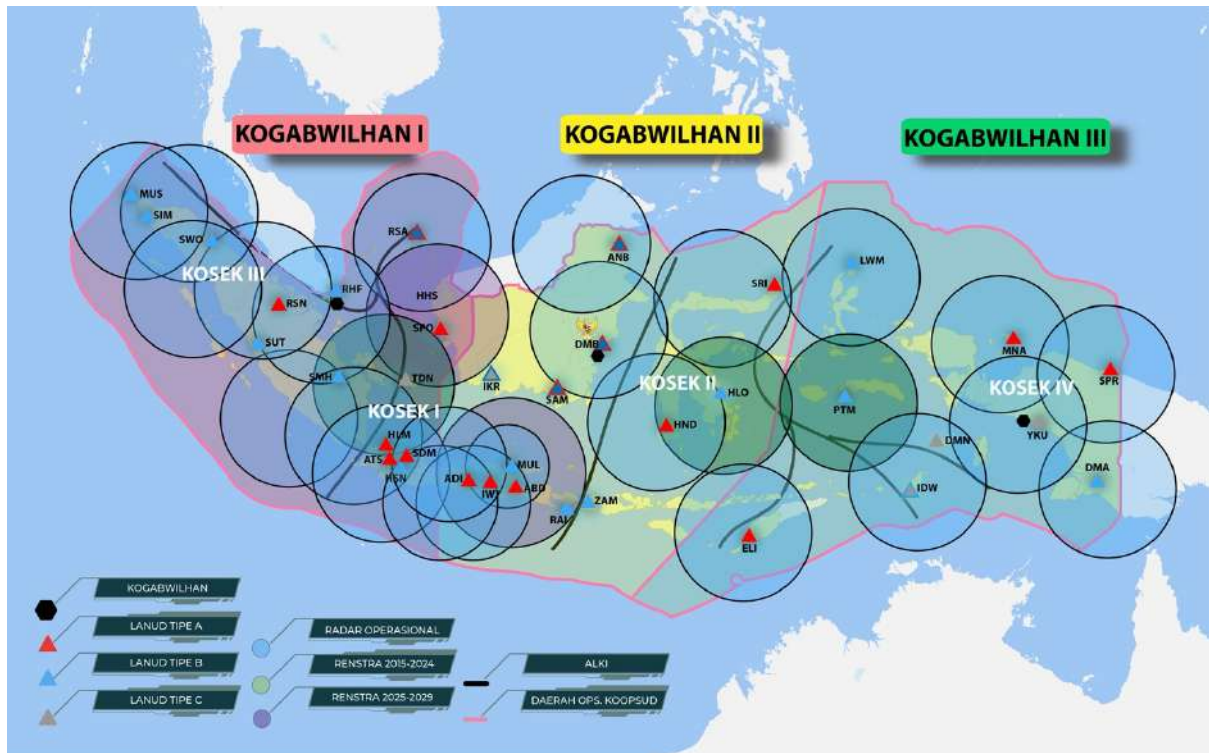


Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menyatakan pembangunan wilayah pertahanan pada matra udara dilaksanakan dalam rangka melindungi wilayah udara nasional termasuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara (*Air Defence Identification Zone*) beserta alat utama sistem persenjataan matra udara. Dengan pembentukan Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas), upaya untuk meningkatkan kapabilitas antiakses/penangkalan wilayah udara di sekitar Ibu Kota Nusantara secara organisasional lebih mungkin untuk dilakukan.

Pembentukan Komando Operasi Udara Nasional akan mengintegrasikan seluruh satuan dan fungsi, baik ofensif dan defensif di matra udara. Koopsudnas membawahi Komando Operasi Udara (Koopsud) di Jakarta,

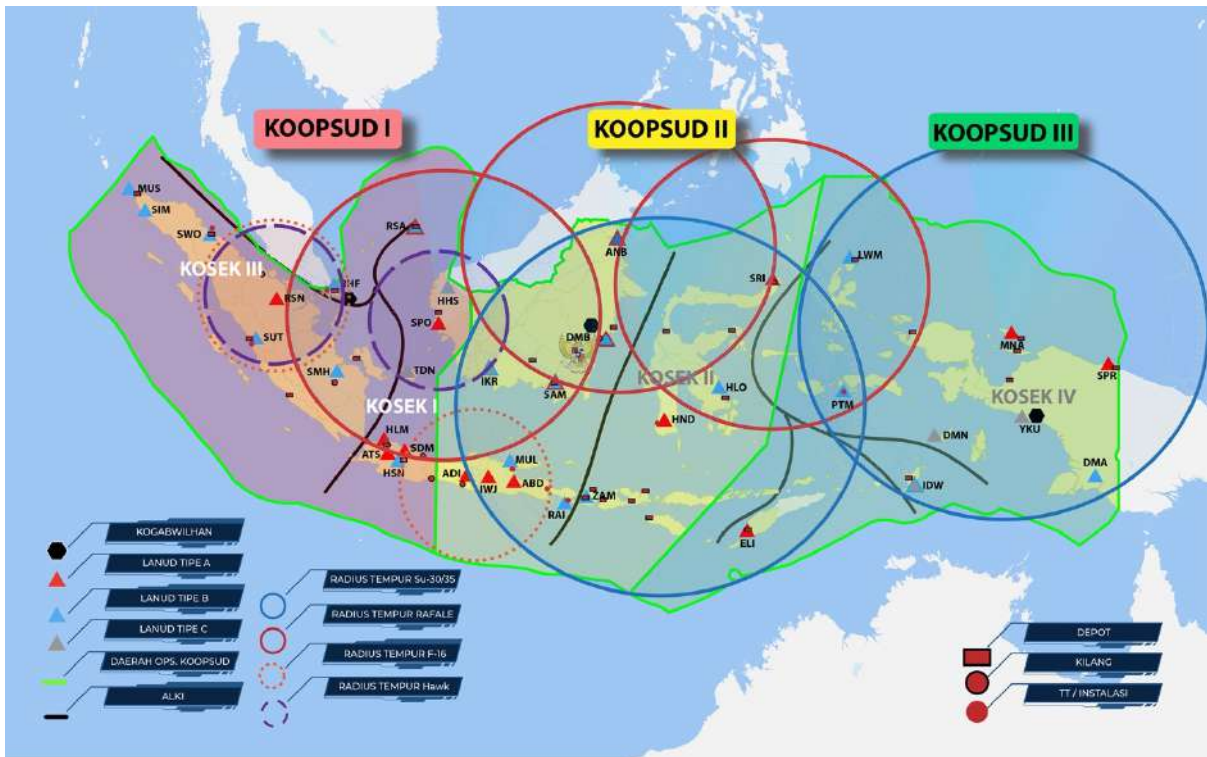
Makassar, dan Biak yang bertugas menyelenggarakan pertahanan udara. Gelar TNI AU untuk pertahanan IKN dapat dilakukan antara lain dengan mengubah status Komando Sektor (Kosek) II di Makassar menjadi Kosek IKN dengan tetap mempertahankan keberadaan Kosek di Jakarta sebagai Kosek II. Kosek IKN setidaknya diperkuat dengan satuan rudal pertahanan udara jarak jauh.

**Gambar 7. Kendali Ruang Udara Nasional**



Peningkatan status Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber dari tipe B menjadi tipe A dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara dengan penempatan skuadron tempur dan skuadron angkut strategis di Balikpapan. Skwadron 17 dan Skwadron 45 yang merupakan skuadron angkut VVIP dapat ditempatkan di pangkalan udara baru yang dibangun di IKN Nusantara sebagaimana disampaikan dalam Perpres No. 63/2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Mengacu pada rencana pengadaan pesawat tempur generasi 4.5 oleh Kementerian Pertahanan, pertahanan Ibu Kota Nusantara pun meniscayakan gelar skadron tempur baru di beberapa Lanud tipe A seperti Supadio, Anang Busra, dan Sam Ratulangi.

**Gambar 8. Gelar Kemampuan Komando Operasi Udara Nasional**



Dalam konteks strategi pertahanan berlapis, TNI AD berperan penting dalam menangkal serangan musuh yang berhasil menembus zona penyangga dan pertahanan. Salah satu kerentanan IKN adalah perbatasan darat yang terbentang kurang lebih 300 kilometer, membuka potensi penyerangan dari beberapa arah secara serentak. Jarak dari perbatasan ke Nusantara, berkisar 384-589 kilometer, menyediakan kedalaman strategis terhadap ancaman berbasis darat. Namun jarak dari pelabuhan laut terdekat ke Nusantara, sejauh 96 kilometer, memungkinkan serangan melalui pendaratan dari laut. Medan geografi yang kompleks, seperti perhutanan dan hutan bakau di luar IKN serta perbukitan di dalam IKN, dapat dieksploitasi oleh pihak defender untuk menahan laju pasukan musuh dan mengamankan evakuasi VIP apabila dibutuhkan.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa pembangunan wilayah pertahanan di darat bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri sesuai dengan kompartemen strategis, melalui desentralisasi dan relokasi depo logistik. Sistem pertahanan berlapis sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasukan matra darat dalam menjalankan strateginya, yang didukung infrastruktur dan prasarana strategis pertahanan gerilya yang otonom. Pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan pun belum selengkap di Pulau Jawa, seperti jalan utama hingga infrastruktur pendukung pertanian.

Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pertahanan IKN akan diimplementasikan dalam matra darat. Lampiran Bab III Perpres No. 63/2022 hanya mengatur sistem pertahanan udara dan keamanan laut. Kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kombinasi karakter ancaman dan geografi militer, peperangan yang akan dilakukan TNI AD akan mencakup pertempuran kota apabila pasukan musuh telah masuk ke wilayah darat Indonesia. Bentuk pertahanan bervariasi, mencakup fortifikasi di wilayah perbatasan dan mobilisasi strategis di dalam IKN. Strategi ini membutuhkan antara lain: (i) pembentukan Komando Daerah Militer khusus IKN beserta satuan-satuan pendukungnya; (ii) penguatan keamanan perbatasan dengan melengkapi pos-pos dan teknologi pengintaian, serta peringatan dini; (iii) koordinasi lintas matra mengingat kapabilitas angkut strategis merupakan keahlian matra laut dan udara.

## **Tentang Laboratorium Indonesia 2045**

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.lab45.id](http://www.lab45.id) atau pindai kode QR.

## **Tentang Center for Business and Diplomatic Studies**

Center for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Universitas Bina Nusantara adalah lembaga penelitian yang merupakan pusat riset dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara.



CBDS bertujuan untuk melaksanakan penelitian dan diseminasi pengetahuan yang dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan ilmu Hubungan Internasional dan menghasilkan kajian yang dapat membantu para pemangku kebijakan serta pelaku bisnis mendapatkan basis informasi yang presisi.

CBDS memiliki fokus utama pada studi mengenai diplomasi, bisnis, dan isu-isu strategis nasional maupun global berdasarkan pada 3 Tema Besar Keilmuan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, yakni : (1) Ekonomi Politik Internasional dan Diplomasi Bisnis; (2) Pertahanan dan Keamanan; (3) Media dan Isu-Isu Kontemporer.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <https://ir.binus.ac.id/cbds/>



Jalan Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap,  
DKI Jakarta 13890

- +62811452045
- lab45@lab45.id
- www.lab45.id